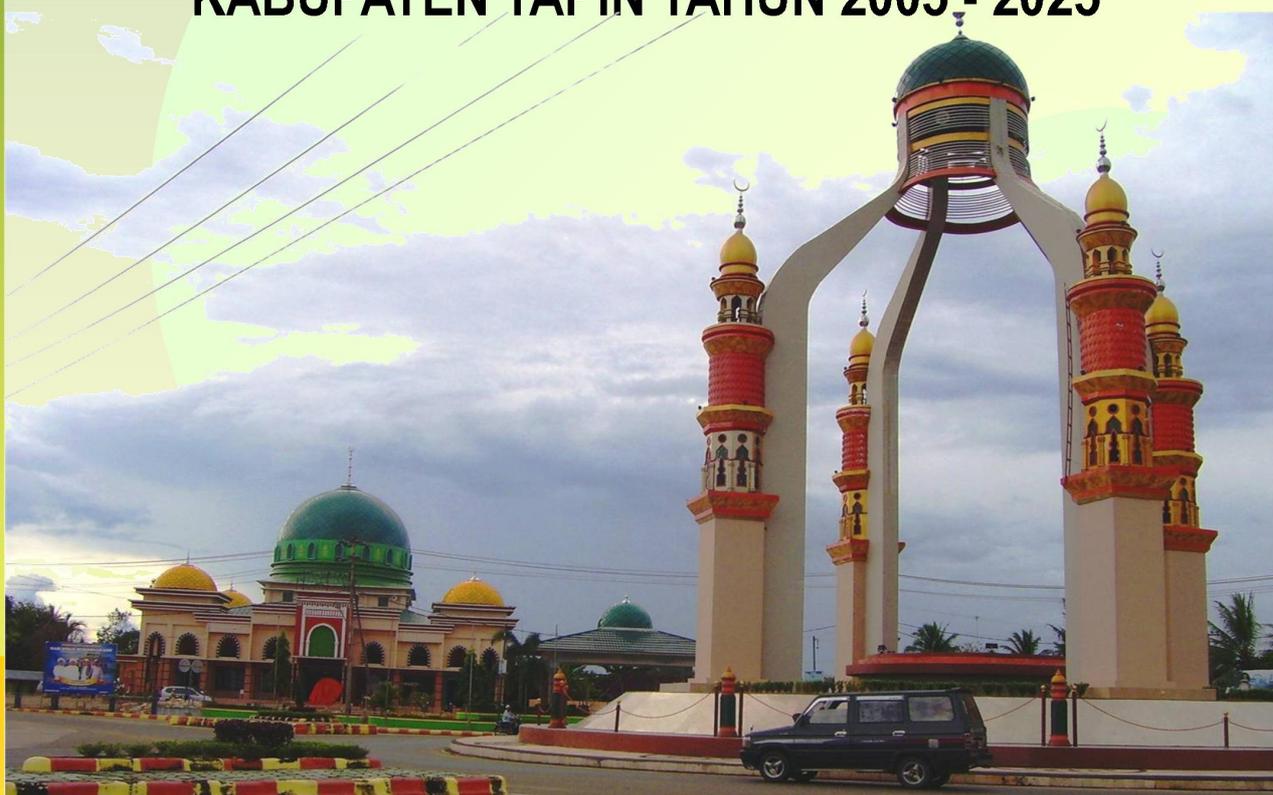




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**REVISI  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005 - 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
2011**



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006-2025 belum sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## **Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

## **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin dengan memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional.

## **Pasal 4**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Tapin.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025**

## **Pasal 5**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	PENUTUP

**BAB III**  
**ISI DAN URAIAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025**

**Pasal 6**

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU**

**Pasal 7**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, yakni Tahun 2005-2025 dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 25 Januari 2013

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 25 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 05**

*Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025*



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2005-2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**2011**

## DAFTAR ISI

	Halaman :
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I - 1
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I - 2
1.3. Landasan Hukum .....	I - 3
1.4. Hubungan RPJPD Kabupaten Tapin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I - 5
1.5. Sistematika Penulisan .....	I - 6
<b>BAB II KONDISI UMUM DAERAH</b> .....	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 10
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 20
2.4. Aspek Daya Saing .....	II - 40
<b>BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS</b> .....	III - 1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	III - 1
3.2. Isu Strategis .....	III - 16
<b>BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005 – 2025</b> .....	IV - 1
4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin 2005 – 2025 .....	IV - 1
4.2. Misi Pembangunan Kabupaten Tapin 2005 – 2025 .....	IV - 2
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	V - 1
5.1. Kebijakan Umum dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Tapin 2005 – 2025 .....	V - 1
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V - 7
5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan 2005 – 2025 .....	V - 17

**BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN ..... VI - 1**

**BAB VII PENUTUP ..... VII - 1**

**Lampiran :**

- **Perumusan sasaran pokok dan indikator kinerja**
- **Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan adalah sebuah perubahan terencana dalam mewujudkan visi sebuah tatanan. Perubahan terencana tersebut ditandai oleh terbukanya ruang bagi unsur-unsur penyusun tatanan untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan pilihannya di dalam berkontribusi terhadap proses pencapaian visi tatanan. Agar kontribusi setiap unsur bisa efektif mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan maka diperlukan sebuah koridor dalam bentuk dokumen perencanaan.

Kabupaten Tapin terbentuk sebagai entitas kesatuan wilayah dan pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan jangka panjang sebagai arahan sosial tentang kondisi masa depan yang hendak diwujudkan dan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita masa depan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, sebuah Kabupaten harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan masa berlaku 20 tahun yakni periode 2005-2025. Undang-Undang SPPN tahun 2004 juga menggariskan bahwa RPJP Daerah Kabupaten harus mengacu kepada RPJPD Provinsi dimana RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional. Dengan rumusan seperti itu maka terbangun sebuah sistem pembangunan jangka panjang yang saling terkait satu sama lain dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Nasional sehingga perubahan yang didorong dapat lebih efektif mewujudkan visi daerah sekaligus visi nasional. RPJP Nasional memayungi arahan jangka

panjang daerah sedangkan RPJP Daerah berkontribusi terhadap pencapaian arahan jangka panjang nasional tersebut.

RPJP Daerah Kabupaten Tapin adalah bagian dari sistem perencanaan jangka panjang tersebut, yang tidak hanya menjadi arahan bagi perwujudan visi Kabupaten Tapin tetapi sekaligus berkontribusi bagi perwujudan visi Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dan visi Republik Indonesia 2005-2025. Penyusunan RPJP Daerah melibatkan serangkaian proses yakni proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik, dan proses *bottom up-top down*. Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah, dan di dalam merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang. Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses, dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJP Daerah baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan. Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJP Daerah ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait daerah, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari RPJP Daerah yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RPJP Daerah ini adalah memberi arahan bagi semua pihak terkait daerah dalam berkontribusi pada pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan RPJP Daerah Kabupaten Tapin juga

dimaksudkan untuk menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Tapin. RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat rasional-komprehensif sekaligus strategis yang jangka waktunya adalah lima tahun, sehingga sebuah dokumen RPJP Daerah menjadi pedoman bagi empat dokumen RPJM Daerah. Dengan demikian, RPJP 2005-2025 akan menjadi koridor bagi empat periode lima tahunan RPJM Daerah Kabupaten Tapin selama periode dua puluh tahun yakni 2005-2025 yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada setiap periode RPJM Daerah.

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya RPJP Daerah adalah terfokusnya arah pembangunan secara jangka panjang menyangkut kondisi yang hendak diwujudkan (visi daerah) dan langkah untuk mewujudkan kondisi tersebut (misi dan arah pembangunan daerah). Selain itu, RPJP Daerah ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan baik secara sektoral maupun secara wilayah dalam tahapan lima tahunan selama 20 tahun ke depan.

### **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287),
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025,

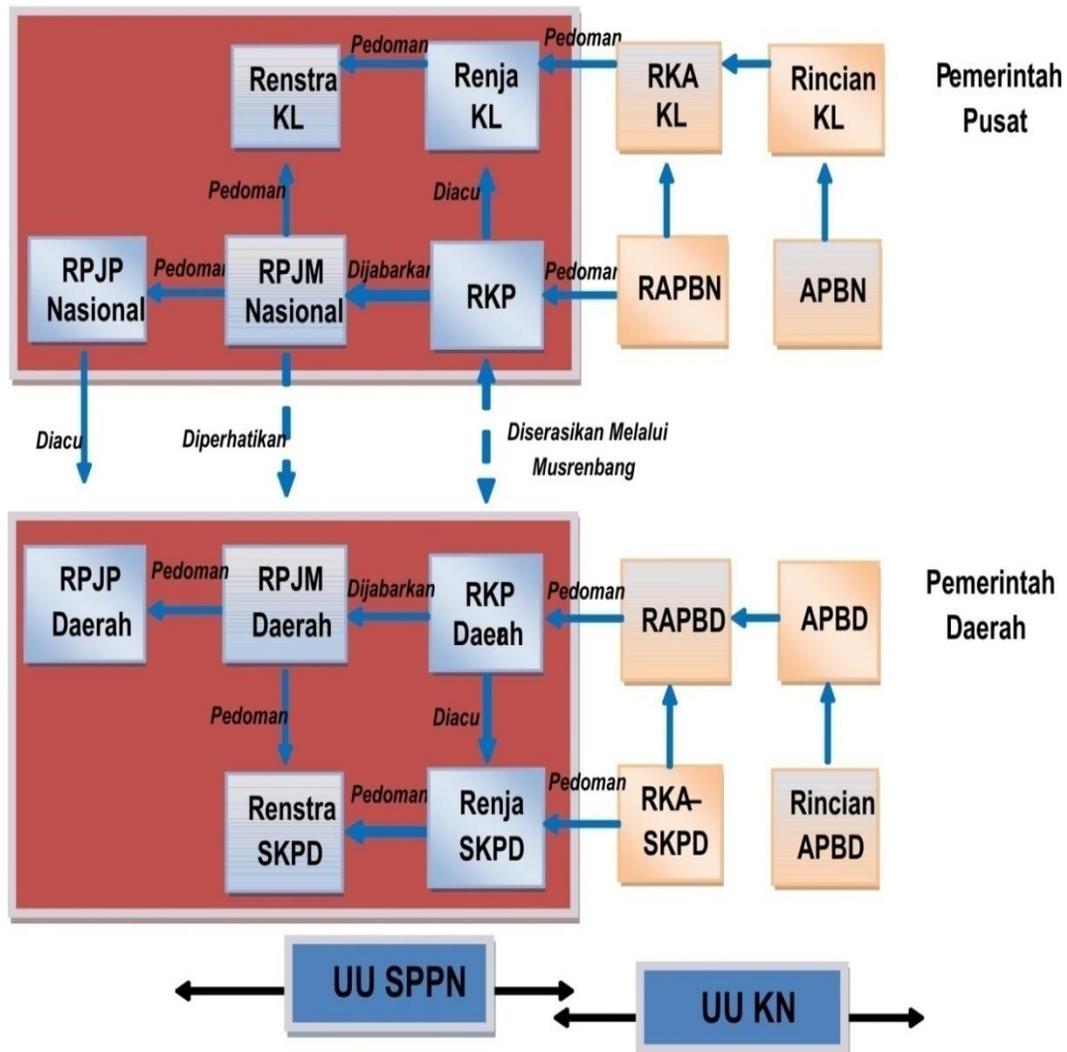
#### **1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 merupakan koridor utama bagi seluruh upaya pembangunan yang berjalan pada periode tersebut karena didalamnya terdapat arahan pembangunan yang sifatnya sektoral, kewilayahan maupun tahapan lima tahunan RPJM Daerah.

RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 memiliki hubungan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin dalam bentuk saling keterkaitan isi yang harus sejalan satu sama lain. RPJP Daerah memberi arahan tentang visi, misi dan arah pembangunan secara substansial, sedangkan RTRW memberi arahan spasial bagi misi dan arah pembangunan dalam mewujudkan visi daerah.

RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 memiliki hubungan erat dengan empat periode RPJM Daerah yang tercakup didalamnya, yaitu periode Tahun 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025. Di samping itu, RPJP Daerah juga merupakan acuan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan program pada setiap periode RPJM Daerah tersebut. Sebagai acuan RPJM Daerah, maka isi RPJP Daerah lebih bersifat arahan makro tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Gambar I.1  
Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



### 1.5. Sistematika Penulisan

RPJP Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan sistematika yang mengacu pada arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum Daerah

***Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025***

Bab III : Analisis Isu Strategis Daerah

Bab IV : Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab VI : Kaidah Pelaksanaan

Bab VII : Penutup.

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1. Kondisi Geomorfologis dan Batas Administratif Kabupaten Tapin**

###### **2.1.1.1. Letak Wilayah**

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak pada koordinat  $2^{\circ} 32' 43''$  BT -  $3^{\circ} 00' 43''$  BT dan  $114^{\circ} 46' 13''$  LS -  $115^{\circ} 30' 33''$  LS. Di sebelah utara Kabupaten Tapin berbatasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah timur berbatasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah selatan berbatasan Kabupaten Banjar, dan sebelah barat berbatasan Kabupaten Barito Kuala.

###### **2.1.1.2. Luas Wilayah**

Kabupaten Tapin seluas  $2.174.95 \text{ km}^2$  yang merupakan 5,80 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas  $681,4 \text{ km}^2$  atau sebesar 31,3 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin, sementara daerah yang paling sempit adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas  $32,34 \text{ km}^2$  atau sebesar 1,5 persen dari luas Kabupaten Tapin.

###### **2.1.1.3. Morfologi Wilayah**

Berdasarkan kemiringannya Kabupaten Tapin banyak terletak pada kemiringan 0-2 persen yaitu sekitar 82,46 persen dari total area Kabupaten Tapin, sedangkan kemiringan antara 2,1 sampai 8 persen hanya sekitar 6,22 persen dari keseluruhan luas daerah di Kabupaten Tapin. Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 8,61 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 15 – 40 persen

#### **2.1.1.4. Ketinggian Wilayah**

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut diketahui hampir seluruh area atau 67,34 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0 – 7 m, sedangkan ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut hanya berkisar 1,21 persen.

#### **2.1.1.5. Geologi**

Jenis tanah di Kabupaten Tapin didominasi jenis organosol gleyhumus, yaitu 73,50 persen dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial yang merupakan tumbuh tanah yang subur luasnya hanya 5,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Disamping itu terdapat pula asosiasi dan kompleks dari kelima jenis tanah utama tersebut.

#### **2.1.1.6. Kemampuan Tanah**

Seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur halus dan sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relative mudah untuk diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

#### **2.1.1.7. Kondisi klimatologis**

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10 mm – 24,17 mm

per hari. Menurut klasifikasi iklim Oldman, wilayah Kabupaten Tapin berada pada kelas C2, C3 dan D3 dengan rangking kebasahan antara 5 – 8.

#### **2.1.1.8. Keadaan iklim**

Kabupaten Tapin dipengaruhi 2 musim yaitu musim hujan dan musim panas. Musim hujan terdiri antara bulan Nopember hingga bulan April dengan temperatur 27°C - 28°C. Sedangkan musim panas terjadi antara bulan April hingga bulan Nopember dengan temperature mencapai 35°C dengan kelembaban udara berkisar antara 51 persen sampai dengan 86 persen.

#### **2.1.1.9. Kondisi Hidrologi**

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh Sungai Nagara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Nagara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Tapin seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan serta Candi Laras Selatan. Kondisi hidrologi khas wilayah Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen, yaitu berupa rawa dengan luas sekitar 133.058 hektar atau 61% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin termasuk dalam Kawasan Rawa Potensial Batang Banyu, yang meliputi wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Belawang, Berambai, Cirebon, Wanaraya, Bakumpai, Tabukan, Kuripan) sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang Empat), sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara dan Tapin Tengah), sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang), Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah dan Banjang), sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, Benua Lawas, Kelua, Muara Halus) yang bercirikan kawasan rawa.

### **2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Adapun bencana alam yang rawan di Kabupaten Tapin adalah kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan banjir.

#### **2.1.4. Tata Ruang**

Prinsip Penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin sebagai sub sistem dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dan Rencana Tata Ruang Nasional.

Kabupaten Tapin secara geografis termasuk ke dalam “Lower Negara River Basin” dengan luas sekitar 159.200 hektar dari “Negara River Basin” yang mempunyai topografi datar, tergenang (rawa), terpengaruh pasang surut, dan mengalami banjir musiman, Hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 - 2015 maka seluruh wilayah rawa di Kabupaten Tapin diperuntukan sebagai kawasan budidaya, yaitu untuk budidaya pertanian lahan basah dan tanaman tahunan (perkebunan). Menurut RTRW tersebut, wilayah rawa di Kabupaten Tapin termasuk dalam program pengembangan rawa potensial, hasil kajian (Negara River Basin Overall Irrigation Development Plant Study, 1989) menyatakan bahwa rawa tersebut masih berpotensi (sesuai) untuk pengembangan pertanian dengan beberapa masukan teknologi, baik untuk tanaman semusim (lahan kering dan lahan basah), budidaya perikanan, maupun beberapa tanaman tahunan. Potensi lahan ini merupakan potensi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, Kawasan pengembangan meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Tengah, Tapin Selatan, Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan dan Binuang. Kelima kecamatan ini direncanakan untuk menjadi kawasan investasi untuk perkebunan kelapa sawit.

Dilain pihak, laju pertumbuhan rumah tangga di Kabupaten Tapin dalam sepuluh tahun terakhir (1990 - 2000) mencapai 2,27 persen atau terjadi peningkatan dibandingkan periode tahun 1980-1990 yang hanya 2,05 persen. Hal ini tentu saja menjadi tantangan untuk menyediakan lapangan kerja bagi rumah tangga baru tersebut. Maka salah satu alternatif

yang dapat ditempuh untuk memecahkannya adalah dengan mengembangkan pertanian melalui perluasan areal (ekstensifikasi) yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian dan menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Tapin pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

#### **2.1.4.1. Struktur Ruang**

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Tapin meliputi;

- a. Konsep pengembangan tata ruang wilayah hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana
- b. Sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal

#### **2.1.4.2. Pola Ruang**

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang meliputi;

- a. Batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan permukiman.
- b. Letak, ukuran dan fungsi kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan permukiman.

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya meliputi;

- a. Garis besar program pemanfaatan ruang jangka panjang, menengah dan pendek
- b. Pengaturan kelembagaan, pengawasan dan penertiban.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan meliputi tujuan pengelolaan dan sasaran pengelolaan kawasan.

- a. Pengelolaan kawasan perdesaan diharapkan meningkatkan daya guna lahan dan hasil guna pemanfaatan ruang dan SDA, sumber daya buatan dan memperhatikan SDM untuk

keharmonisan dan keserasian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.

- b. Pengelolaan kawasan perkotaan dalam upaya meningkatkan daya guna lahan dan hasil guna pemanfaatan ruang dan SDA, sumber daya buatan dan memperhatikan SDM untuk keharmonisan dan keserasian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.
- c. Kepentingan masyarakat melalui kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti daya dukung dan kesesuaian lahan, aspek sosial dan aspek ruang.

Rencana Sistem Prasarana Wilayah meliputi sistem prasarana transportasi, sistem prasarana drainase, sistem prasarana telkom, sistem prasarana energi, dan sistem pengelolaan lingkungan.

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan dan SDA lainnya melalui pola pengelolaan yang memperhatikan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, teknis dan lingkungan.

Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan diprioritaskan pada :

- a. Kawasan pertanian dan perkebunan
- b. Kawasan pertambangan (terutama pertambangan batubara)
- c. Kawasan Rawa (meliputi Tapin Selatan, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan)
- d. Kawasan Lindung di Kecamatan Piani dan Kecamatan Hatungun

## **2.1.5. Demografi**

### **2.1.5.1. Jumlah penduduk.**

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin menurut Sensus Penduduk tahun 1980 berjumlah 108.573, kemudian pada Sensus penduduk tahun 1990 menjadi 126.625, dan pada Sensus Penduduk tahun 2000 mencapai 141.266. Sedangkan menurut Susenas 2004 berjumlah 147.534 jiwa. Dan menurut registrasi penduduk tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Tapin mencapai 149.095 jiwa. Tingkat Pertumbuhan penduduk selalu lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan, dimana selama tahun 1980-1990 penduduk Tapin tumbuh rata-rata 1,55 persen per tahun. Dan periode 1990-2000 sebesar 1,10 persen per tahun.

### **2.1.5.2. Tingkat pertumbuhan penduduk.**

Tingkat pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan pada periode 1980-1990 mencapai 2,32 persen, sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,37 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2006 sebesar 1,15 persen meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk tahun 2005 disini terlihat bahwa Kabupaten Tapin relatif rendah bebannya dalam menghadapi desakan jumlah penduduk dari pada rata-rata Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini jangan sampai membuat Pemerintah Daerah lengah, tetapi harus selalu memperhatikan perkembangannya. Oleh karena itu, apabila tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain terhambatnya usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, baik pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan kerja dsb. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi, menjadi kurang berarti.

### **2.1.5.3. Kepadatan penduduk.**

Kepadatan penduduk menurut Sensus tahun 1980 rata-rata sebesar 40,20 jiwa per km<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 1990 sebesar

46,89, tahun 2000 sebesar 52,31, dan pada tahun 2005 mencapai 55 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan antar kecamatan cukup variatif, Kecamatan Candi Laras Utara merupakan daerah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yaitu 14 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tapin Utara sebesar 270 jiwa per km<sup>2</sup> merupakan Kecamatan yang terpadat penduduknya di Kabupaten Tapin. Laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Hal ini dicapai dengan adanya partisipasi aktif masyarakat merencanakan keluarga secara matang sehingga tingkat kelahiran menurun, kematian bayi dan balita menurun, dan tingkat harapan hidup meningkat.

#### **2.1.5.4. Keagamaan.**

Kehidupan beragama di Kabupaten Tapin, dirasakan adanya perkembangan yang lebih baik, dilihat dari aspek fisik maupun non fisik, seperti makin maraknya pembangunan tempat ibadah, kelompok-kelompok pengajian serta besarnya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dan toleransi antar umat beragama yang semakin baik. Namun peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah terwujud dengan baik. Ajaran agama menghendaki implementasi yang lebih mendalam dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Kabupaten Tapin yang taat dan kuat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, akan menjadi salah satu faktor penentu terhadap keberhasilan pembangunan, terlebih dengan didukung oleh sifat masyarakatnya yang memegang teguh adat istiadat, terbuka terhadap peradaban dan pembaharuan, tingginya sifat kekeluargaan dan gotong-royong serta tingginya partisipasi masyarakatnya dalam setiap kegiatan pembangunan.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Nilai dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2000 nilai PDRB sebesar Rp. 660.053.490 (ribuan), tahun 2001 sebesar 711.970.390 (ribuan), dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.163.522.710 (ribuan). Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku pertahun, sebagaimana ditunjukkan Tabel-1, tahun 2000 (8,02%); 2002 (11,58%); dan pada tahun 2005 meningkat menjadi (16,46 %).

Tabel 1 : Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin 2000-2005 Atas Dasar Harga Berlaku.

(dalam ribuan)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Per lima tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	660.053.490	8,02	12,04
2001	711.970.390	7,87	
2002	794.431.390	11,58	
2003	889.197.870	11,93	
2004	999.069.280	12,36	
2005	1.163.522.710	16,46	

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, Diolah.

PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2000 nilainya Rp. 660.053.023 (ribuan), tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 679.458.131 (ribuan), tahun 2002 mencapai Rp. 707.821.484 (ribuan), dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 789.732.001 (ribuan) dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pertahun untuk tahun 2000

(0,15%); 2001 (2,94 %); 2002 (4,17%); serta pada tahun 2005 mencapai (3,49%).

Tabel-2 : Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin 2000-2005 Atas Dasar Harga Konstan.

(dalam ribuan)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga konstan	Pertumbuhan PDRB Harga konstan	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Per lima tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	660.053.023	0,15	3,65
2001	679.458.131	2,94	
2002	707.821.484	4,17	
2003	733.697.231	3,66	
2004	763.078.763	4,00	
2005	789.732.001	3,49	

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, Diolah.

### 2.2.1.2. Nilai dan Pertumbuhan PDRB perkapita.

Pada tahun 2000 PDRB perkapita Kabupaten Tapin atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4.607,12 (ribuan) tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 4.963,70 (ribuan) tahun 2003 mencapai Rp. 5.955,02 (ribuan) dan tahun 2005 mencapai Rp. 7.528,94 (ribuan) Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pertahun, sebagaimana ditunjukkan Tabel-3, tahun 2000 (7,30%); 2001 (7,15%); dan untuk tahun 2003 (10,01%); untuk tahun 2005 (14,48%).

Tabel-3 : PDRB Perkapita Kabupaten Tapin Tahun 2000-2005 Atas Dasar Harga Berlaku.

(dalam ribuan)

Tahun	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Berlaku	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Berlaku Pertahun
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	4.607,12	7,30	
2001	4.936,70	7,15	

2002	5.413,32	9,65	11,81
2003	5.955,02	10,01	
2004	6.576,50	10,44	
2005	7.528,94	14,48	

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, Diolah.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2000 nilainya sebesar Rp. 4.607,12 tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 4.711,26 tahun 2002 mencapai Rp. 4.823,15 dan di tahun 2005 mencapai Rp. 5.110,21. Laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pertahun untuk tahun 2001 (2,26%); 2002 (2,37%); dan 2005 (1,73%).

Tabel-4 : PDRB Perkapita Kabupaten Tapin Tahun 2000-2005 Atas Dasar Harga Konstan.

(dalam ribuan)

Tahun	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	Pertumbuhan PDRB Perkapita konstan	Rata-rata Pertumbuhan PDRB Perkapita Harga Konstan Pertahun
2000	4.607,12	-0,51	1,99
2001	4.711,26	2,26	
2002	4.823,15	2,37	
2003	4.913,62	1,88	
2004	5.023,06	2,23	
2005	5.110,21	1,73	

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, Diolah.

### 2.2.1.3. Struktur PDRB.

Struktur lapangan usaha Kabupaten Tapin atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2001 kontribusi sektor pertanian sebesar 4,65 persen, tahun 2003 meningkat menjadi 7,99 persen, tahun 2005 menjadi 13,48 persen. Sedangkan sektor-sektor lain yang cenderung mengalami kenaikan terutama sektor pertambangan dan listrik, Gas dan air bersih. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertambangan sebesar 4,57 persen, tahun 2001 menjadi 9,21 persen, pada tahun 2003 kondisi sektor

pertambangan menjadi sebesar 22,69 persen dan pada tahun 2005 sebesar 26,37 persen. Selanjutnya sektor listrik, gas dan air bersih tahun 2000 sebesar 0,51 persen, tahun 2001 meningkat menjadi 19,79 persen, dan pada tahun 2025 sebesar 29,43 persen.

Tabel-5 : Struktur PDRB Kabupaten Tapin atas Dasar Harga Berlaku tahun 2000-2005.

Tahun	Harga Berlaku								
	Pertanian	Pertamb & penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air Bersih	Bangunan	Perdag. Resto dan Hotel	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa	Jasa Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2000	48,39	4,57	2,94	0,51	16,66	2,23	3,48	15,00	10,00
2001	4,65	9,21	8,43	19,79	13,20	9,68	14,41	16,12	9,89
2002	8,68	27,14	7,70	17,61	12,40	11,13	9,81	18,87	5,46
2003	7,99	22,69	10,10	12,24	9,39	14,64	8,45	10,26	12,83
2004	7,26	29,36	4,97	15,24	5,98	3,13	3,64	23,06	16,21
2005	13,48	26,37	12,37	29,43	10,69	13,12	11,97	20,75	15,60

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, BPS, Diolah.

Distribusi prosentase PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2000 sebesar 0,98 persen, tahun 2003 menjadi sebesar 1,13 persen, tahun 2005 mencapai 4,37 persen. Sedangkan sektor-sektor yang lain cenderung mengalami kenaikan terutama sektor pertambangan dan keuangan, persewaan dan jasa. Untuk sektor pertambangan pada tahun 2001 sebesar 6,07 persen, tahun 2002 mencapai 7,93 persen tahun 2003 menjadi sebesar 11,77 persen, tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 6,90%. Selanjutnya sektor keuangan persewaan & jasa pada tahun 2000 sebesar 1,59 persen, tahun 2003 meningkat menjadi 2,15 persen, tahun 2004 meningkat menjadi 2,67 persen.

Tabel-6 : Struktur PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2000-2005 Atas Dasar Harga Konstan.

Tahun	Harga Konstan								
	Pertanian	Pertamb & penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air Bersih	Bangunan	Perdag. Resto dan Hotel	Angkutan & Komunikasi	Keuangan, Persewaan & Jasa	Jasa Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2000	0,98	10,11	1,31	11,00	0,25	2,11	3,12	1,59	3,18
2001	1,20	6,07	1,70	13,49	2,73	4,30	3,48	11,11	4,04
2002	4,08	7,93	2,00	12,84	1,23	4,82	0,41	10,39	2,68
2003	1,13	11,77	5,26	1,68	2,95	4,66	4,06	4,42	2,15
2004	1,04	19,78	0,24	-1,44	-4,34	2,38	-0,24	2,67	2,39
2005	4,37	6,90	-2,07	4,27	-17,57	3,73	-1,32	-1,42	5,56

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, BPS, Diolah.

Apabila distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dikelompokkan berdasarkan tiga sektor utama, yakni sektor pertanian; sektor manufaktur (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan); sektor jasa (perdagangan, restoran dan hotel; angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa; jasa-jasa), maka sektor pertanian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan sektor manufaktur dan sektor jasa menunjukkan fluktuasi kondisi persektor dari tahun ke tahun.

#### 2.2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,05 persen, tahun 2001 sebesar 2,94 persen; tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 4 persen, dan tahun 2005 pertumbuhan 3,49 persen.

Tabel-7 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2000-2005 Atas Dasar Harga Konstan.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per lima tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2000	2,05	13,91
2001	2,94	
2002	4,17	
2003	3,66	
2004	4,00	
2005	3,49	

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin, BPS, Diolah.

#### 2.2.1.5. Kualitas manusia.

Berdasarkan aspek kualitas dilihat dari perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin menunjukkan peningkatan, yaitu dari 59,10 pada tahun 1999 menjadi 67,0 pada tahun 2002, pada tahun 2002 menunjukkan angka sebesar 64,3, kemudian pada tahun 2004 naik menjadi 67,9. Sementara Kalimantan Selatan hanya sebesar 66,7. Kemudian pada tahun 2005, IPM mencapai 68,6, sedangkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 67,4. Secara nasional peningkatan ini masih belum seperti harapan yang diinginkan, karena Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin berada pada posisi ke 228 tahun 2004, menjadi peringkat ke 232 pada tahun 2005. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, pada tahun 2004 dan 2005 berada pada posisi ke 4. Dengan demikian secara nasional, kondisi kualitas SDM Kabupaten Tapin masih tertinggal. Hal ini akan menyulitkan apabila kita akan masuk pada lingkungan global jika kondisi ini kurang mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah Kabupaten Tapin.

## **2.2.2. Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1. Persentase penduduk miskin.**

Penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 5,03 persen yang berarti telah menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,05 persen, namun pada tahun 2005 angka kemiskinan di Kabupaten Tapin besarnya mencapai 8,12 persen. Angka kemiskinan tentunya akan terus menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang kian membaik bagi masyarakat Tapin.

### **2.2.2.2. Angka pengangguran terbuka.**

Angka pengangguran terbuka yang merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, pada tahun 1999 mencapai 2,06 persen. Kemudian, pada tahun 2004 turun menjadi 1,40 persen dan pada tahun 2005 naik lagi menjadi 1,98 persen. Hal ini patut mendapat perhatian dalam rangka pemerintah menyusun kebijakan pembangunan.

### **2.2.2.3. Indikator Kesehatan**

Bila dilihat dari perkembangan beberapa indikator seperti; Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, serta Angka Kematian Bayi memang menunjukkan peningkatan, tetapi masih berada dibawah rata-rata Nasional. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin pada 2004 adalah sebesar 65,8 yang lebih tinggi di banding Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan 61,6. Kemudian pada tahun 2005 Angka harapan Hidup Kabupaten tapin naik menjadi 66,2, sedangkan Provinsi Kalimantan selatan hanya sebesar 62,1 tahun. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi yang pada tahun 1990 besarnya mencapai 75/1000, kemudian pada tahun 2003 turun menjadi 15/1000, lebih baik dibanding Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai 45/1000. Namun secara umum keadaan kesehatan penduduk Kabupaten Tapin masih belum menggembirakan. Hal ini tercermin dalam indikator

Angka Kesakitan, dimana pada tahun 2003 mencapai 31,4 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 25,37 persen. Hal ini berarti, bahwa lebih dari 30 persen penduduk Kabupaten Tapin pernah mengalami gangguan kesehatan yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian pada tahun 2005, angka kesakitan Kabupaten Tapin hanya 12,60 persen.

#### **2.2.2.4. Angka Harapan Hidup.**

Nilai indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, angka harapan hidup Kabupaten Tapin sebesar 67,30 tahun, pada tahun 2005 sebesar 67,40 tahun, pada tahun 2006 sebesar 65,8 tahun, pada tahun 2007 sebesar 66,7 tahun, dan pada tahun 2008 sebesar 66,91 tahun. Dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008 sebesar 63,10 tahun, capaian Kabupaten Tapin masih lebih baik dari pada capaian Propinsi Kalimantan Selatan.

#### **2.2.2.5. Daya Beli Masyarakat.**

Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Tapin masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih baik dari pada rata-rata nasional, namun telah terjadi peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Pada tahun 2004, nilai indeks daya beli masyarakat Kabupaten Tapin sebesar 617.000 (Provinsi mencapai 619.000; Nasional mencapai 614.000), tahun 2005 sebesar 620.000 (Provinsi mencapai 622.700; Nasional mencapai 619.000), tahun 2006 sebesar 621.900 (Provinsi mencapai 623.800; Nasional mencapai 621.200), dan tahun 2007 sebesar 621.900 (Provinsi mencapai 625.800; Nasional mencapai 624.37). (2008).

#### **2.2.2.6. Indikator Pendidikan**

Bila dilihat dari perkembangan beberapa indikator seperti; Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni

(APM), belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2002, Angka Melek Huruf Kabupaten Tapin besarnya 92,6 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 93,3 persen. Kemudian pada tahun 2004, Angka Melek Huruf Kabupaten Tapin adalah 92,3 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 94,8 persen. Namun pada tahun 2005, angka melek huruf naik menjadi 92,7 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 95,3 persen. Di lain pihak, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin pada tahun 2002 adalah 6,2 tahun, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,0 tahun. Kemudian tahun 2004, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin naik menjadi 6,7 tahun, sementara Kalimantan Selatan mencapai 7,2 tahun. Tahun 2005 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapin mencapai 6,8 tahun, sementara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,3 tahun.

### **2.2.3. Seni Budaya, Olahraga dan pariwisata**

Meningkatkan kualitas kehidupan budaya, pemuda, olah raga pemerintah Kabupaten Tapin melengkapi sarana dan prasarana olah raga yang telah ada salah satunya dibuktikan dengan membangun fasilitas gedung (GOR) tambahan yang diberi nama Sultan Kuning, GOR Sultan Kuning juga sempat digunakan untuk even Pekan Olah Raga Propinsi (Porprop) VII Kalsel tahun 2006, untuk lebih memantapkan Kabupaten Tapin sebagai kota olahraga telah dibangun sebuah arena sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang dan tidak jauh dari areal ini pula telah dibangun stadion binuang dan asrama pendidikan dan latihan bagi masyarakat pecinta olahraga. Perkembangan sarana prasarana pada berakhirnya perodesasi RPJPD Kabupaten Tapin digambarkan akan terus meningkat dikarenakan masyarakat Kabupaten Tapin yang umumnya gemar berolahraga, dengan kondisi sarana dan prasarana yang sudah cukup baik hanya tinggal memperhatikan pemeliharaan untuk kedepannya.

Kabupaten Tapin juga dikenal dengan dengan objek wisatanya, objek wisata yang dimiliki Tapin dapat dikelompokkan ke dalam empat macam jenis wisata yaitu :

1. *Wisata* Alam dengan nama objek Goa Batu Hapu dengan daya tarik Goa Wisata dan Camping yang terletak di Kecamatan Binuang dengan Aksesibilitas 38 Km dari Kota Rantau, Goa Bramban dengan daya tarik Ground terletak di kecamatan Piani 16 Km dari Kota Rantau, Rute Miawa – Loksado, gunung Lambukung dan Gunung Lampinit daya tarik yang dimiliki Goa Alam Basah maupun kering, Staglanit, sarang Kelelawar/ tracking dan panorama alam terletak di Kecamatan Piani dan Bungur dengan jarak 17-18 Km dari Kota Rantau.
2. *Wisata* Budaya dengan nama objek Dayak Bukit daya tarik berupa kawasan suku terasing di Kecamatan Piani dengan aksesibilitas 8 Km dari rantau, Situs Candi Laras dengan panorama alam yang terletak di Kecamatan Candi Laras Selatan berjarak 33 Km dari Kota Rantau, Pusat Kesenian Tradisional Pandahan dengan daya tarik kerajinan tradisional Anyaman dan Souvenir Peneliti seni Tradisional yang terdapat di Kecamatan Tapin Tengah dengan jarak 10 km dari kota Rantau.
3. *Wisata* Sejarah dengan nama objek jiarah Makam Datu Sanggul daya tarik yang dimiliki Makam Tokoh Daerah/Religius terletak di Tapin Selatan berjarak 14 Km dari Kota Rantau.
4. *Wisata* Buatan dengan objek Pasar Binuang daya tarik yang dimiliki stop ove, restoran dan lainnya terletak di Kecamatan Binuang berjarak 40 Km dari Kota Rantau.

Beberapa prediksi mengenai dunia pariwisata di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya produk pariwisata yang berupa obyek dan daya tarik wisata (ODTW).
2. Meningkatnya aksesibilitas obyek dan daya tarik wisata (ODTW)

3. Berkembangnya sarana dan prasarana.
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) pariwisata.
5. Berkembangnya kelembagaan pendukung pembangunan pariwisata.
6. Berkembangnya investasi di sektor pariwisata dan meningkatnya kerjasama.
7. Berkembangnya seni budaya, kerajinan rakyat tradisional yang dapat menunjang pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.

## **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.3.1. Pelayanan Wajib**

#### **2.3.1.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan kualitas non fisik penduduk. Pendidikan memegang peranan penting, dan merupakan salah satu sektor yang harus selalu mendapat perhatian, mengingat pendidikan merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita pembangunan. Dengan pendidikan yang memadai, seseorang akan dapat berperan lebih leluasa dalam menentukan nasib dan mengejar kesejahteraan hidupnya. Pendidikan mencakup; pendidikan formal dan non formal.

- Untuk indikator APS (proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu), pada tahun 2003 untuk kelompok umur 7-12 tahun besarnya 96,73, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 96,34. Kemudian Kelompok umur 13-15 tahun, APS Tapin besarnya 68,23, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan besarnya 73,47. Kelompok umur 16-18 tahun, APS Tapin sebesar 36,45, dan Provinsi Kalimantan Selatan 41,44. Dan untuk kelompok umur 19-24 tahun, APS Tapin adalah 6,94, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 9,57. Untuk indikator APM (Angka Partisipasi Murni), pada tahun 2005 untuk kelompok umur 7-12 tahun besarnya adalah 90,95 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 93,29 persen. Seterusnya untuk kelompok

umur 13-15 tahun, APM Tapin sebesar 51,47 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 55,77 persen. Untuk kelompok umur 16-18 tahun, APM Tapin sebesar 24,01, sementara Kalimantan Selatan mencapai 30,06 persen. Dan untuk kelompok umur 19-24 tahun, APM Tapin adalah 2,15 persen, Kalimantan Selatan 5,68 persen.

- Pada tahun 2001 dilihat dari indikator APK (Angka Partisipasi Kasar) masing-masing adalah, untuk kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 104,53 persen, kelompok 13 – 15 tahun sebesar 66,03 persen, kelompok 16 – 18 tahun sebesar 20,14 persen dan kelompok 19 – 24 tahun sebesar 0,92 persen. Sementara APK Kalimantan Selatan untuk kelompok umur 7 – 12 tahun adalah 101,42 persen, kelompok umur 13 – 15 tahun sebesar 62,08 persen, kelompok umur 16 – 18 tahun sebesar 25,70 persen dan kelompok umur 19 – 24 tahun mencapai 1,48 persen. Tetapi pada tahun 2005 secara umum indikator APK mengalami peningkatan, yaitu: untuk kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 98,83 persen, kelompok 13 – 15 tahun sebesar 68,39 persen, kelompok 16 – 18 tahun sebesar 31,48 persen dan kelompok 19 – 24 tahun sebesar 2,69 persen. Namun jika dibandingkan dengan APK Kalimantan Selatan maka APK Kabupaten Tapin berada dibawahnya, dimana untuk kelompok umur 7 – 12 tahun adalah 100,77 persen, kelompok umur 13 – 15 tahun sebesar 72,88 persen, kelompok umur 16 – 18 tahun sebesar 43,51 persen dan kelompok umur 19 – 24 tahun mencapai 6,22 persen.
- Capaian pendidikan tertinggi penduduk Kabupaten Tapin juga masih rendah, dimana yang paling dominan hanya tamat SD. Pada tahun 2003, persentase penduduk yang hanya menamatkan pendidikan SD jumlahnya mencapai 35,4 persen, SLTP 12,9 persen, SLTA 11,6 persen, Diploma 1,6 persen dan Universitas 1,4 persen. Pada tahun 2004 kondisinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2003, dimana persentase penduduk yang tidak Sekolah mencapai 10,9 persen, Tidak Tamat SD sebesar 26,8 persen, Tamat SD 36,2 persen, Tamat SLTP 12,9 persen, Tamat SLTA 19,7 persen, Diploma 1,6 persen, dan Universitas sebesar 1,0 persen. Demikian pula pada tahun 2005, masih terdapat sebanyak

4,21 persen penduduk usia 10 tahun keatas, yang belum pernah menikmati pendidikan formal. Sedangkan yang tidak tamat SD mencapai 39,71 persen, Tamat SLTP sebesar 13,83 persen, Tamat SLTA 11,82 persen, Diploma 1,96 persen, serta Universitas 1,27 persen.

- Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan syarat mutlak untuk pembangunan. Peningkatan jumlah sekolah akan memungkinkan daya tampung yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Tapin juga berupaya untuk meningkatkan jumlah serta kualitas sekolah yang ada agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah.

Tabel 8 : Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001 sd 2005

Sekolah	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
SD	181	180	179	179	175
SLTP	17	18	18	18	18
SLTA	6	4	4	4	4
SMK	1	2	2	2	2

Sumber :Kabupaten Tapin Dalam Angka

Jumlah sekolah di suatu daerah seharusnya memiliki perbandingan yang proporsional dengan jumlah penduduk usia sekolah. Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah hendaknya diiringi dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai.

- Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan SD sederajat, rasio penduduk usia sekolah terhadap sekolah berkisar antara 19.373-18.642. Sedangkan pada jenjang SLTP, rasionya berkisar antara 2.637-2.114. Penurunan rasio penduduk usia 16-18 terhadap sekolah SLTA mengalami penurunan yang cukup tajam sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2005. Penurunan rasio ini menunjukkan semakin kecilnya partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada SLTA, namun disisi lain harus dilakukan pemantauan secara berkala sehingga rasio penduduk terhadap sekolah meningkat.

Tabel 9 : Rasio Penduduk Usia Sekolah terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2001 sd 2005

Sekolah	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
SD sederajat	19.373	18.964	18.642	18.642	18.236
SLTP sederajat	2.637	2.362	2.114	2.114	2.199
SLTA sederajat	1.104	1.505	1.027	1.027	1.056

Sumber :Kabupaten Tapin Dalam Angka

- Jika dilihat rasio murid terhadap guru, maka rasio murid-guru semakin baik. Pada jenjang pendidikan SD atau sederajat, rasio murid guru adalah sebesar 14 dan naik menjadi 13 pada tahun 2002 dan 2004. Artinya secara rata-rata 1 orang guru SD di Kabupaten Tapin harus menangani 13 orang murid. Sedangkan rasio murid guru pada jenjang SLTP dan SLTA sederajat pada tahun 2001-2005 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005, 1 orang guru SLTP harus menangani 7 orang murid sedangkan 1 orang guru SLTA harus menangani 13 orang murid.

Tabel 10 :Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2001 sd 2005

Sekolah	Tahun				
	2001	2002	2003	2004	2005
SD sederajat	14	14	13	13	13
SLTP sederajat	8	8	6	6	7
SLTA sederajat	12	9	30	30	13

Sumber :Kabupaten Tapin Dalam Angka

### 2.3.1.2. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin dapat dicerminkan oleh ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin pada tahun 2005 tersedia sarana pelayanan kesehatan yang cukup baik berupa Rumah Sakit Umum (1 buah), Gudang Farmasi (1 buah), Puskesmas (13 buah), dan Puskesmas Pembantu (49 buah) serta Puskesmas Keliling (17 buah) Politeknik Desa sebanyak (110 buah) Posyandu sebanyak (189 buah). Sarana kesehatan juga ditunjang oleh tenaga medis yang terdiri dari dokter umum 27 orang dan dokter gigi 6 orang serta dokter spesialis 6 orang

### **2.3.1.3. Keluarga Berencana**

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Tapin mengalami penambahan dari 34.778 KK pada tahun 1996 menjadi 35.285 KK pada tahun 1998, 40.401 KK pada tahun 2005 dan menjadi 43.149 KK pada tahun 2008. Dari jumlah kepala keluarga tersebut, pasangan usia subur (PUS) sebanyak 25.173 (1996), 2.466 (1998), 4.627 (2005) dan menjadi 25.163 (2008). Jumlah peserta KB aktif tahun 1996 sebanyak 19.709 pasangan, tahun 1998 sebanyak 18.282 pasangan, tahun 2005 sebanyak 22.681 pasangan dan tahun 2008 mencapai 26.145 pasangan.

### **2.3.1.4. Ketenagakerjaan**

Aspek Ketenagakerjaan, yang dianggap sebagai aspek paling mendasar dalam kehidupan masyarakat, karena mencakup berbagai dimensi, baik sosial maupun ekonomi. Masalah yang sering timbul dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan ini adalah masalah pengangguran, yang merupakan akibat dari peningkatan jumlah angkatan kerja, yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Angka pengangguran di Kabupaten Tapin pada tahun 1999 sebesar 2,06 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,86 persen. Kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 5,45 persen dan Kalimantan Selatan besarnya 7,97 persen. Kemudian pada tahun 2004, angka pengangguran Kabupaten Tapin turun menjadi 1,40 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 6,18 persen.

### **2.3.1.5. Sosial**

Masalah sosial yang dianggap krusial adalah penanganan kelompok usia lanjut, anak yatim piatu, dan aktivitas tidak produktif kelompok muda penganggur. Sementara itu penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelacuran, gelandangan dan pengemis cenderung tidak dominan. Kelompok usia lanjut jumlahnya di kabupaten Tapin mencapai 1.909 orang; tetapi mereka tidak memiliki akses pembinaan karena hingga tahun 2005 tidak ada rumah panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; sementara kultur lokal juga tidak terbiasa untuk

menyerahkan orangtuanya untuk dirawat di panti jompo. Panti asuhan yang menangani anak yatim piatu pada tahun 2005 berjumlah 7 buah yang menampung 441 orang anak; tetapi eksistensi mereka masih berpola swadaya dan dikelola oleh yayasan yang berbasis dukungan dermawan lokal. Sampai tahun 2005, jumlah pemuda penganggur di kabupaten ini yang terdata oleh Dinas Ketenagakerjaan mencapai 8.144 orang dan sekitar 96 persen di antaranya merupakan tenaga kerja tidak berpendidikan. Oleh karena itu, persoalannya menjadi agak rumit karena berkaitan dengan orientasi mereka yang cenderung ingin mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor formal; padahal peluang untuk itu sangat kecil karena hanya terbatas pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah melalui jalur penerimaan PNS. Untuk menanggulangi masalah tidak produktifnya kelompok muda penganggur ini telah diupayakan alternatif program padat karya dan pelatihan terpadu; yang hingga tahun 2005 telah melibatkan 100 orang yang terbagi dalam 10 buah kegiatan diklat.

#### **2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan**

Dalam rangka menggalang aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan, maka sejak tahun 2005 telah dikembangkan pola penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) guna merumuskan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah). Musrenbang ini melibatkan stakeholders yang antara lain terdiri dari tokoh masyarakat, ormas, orpol, dan lembaga swadaya masyarakat; selain melibatkan pula unsur-unsur struktural yang relevan di lingkungan Pemda Tapin. Dengan pola perencanaan seperti ini diharapkan implementasinya dapat lebih efektif dan mendapatkan dukungan segala pihak. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, peran Kecamatan (yang dipimpin Camat) dan Desa/Kelurahan (yang dipimpin Kepala Desa/Kelurahan) sangat penting. Eksistensi Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kabupaten Tapin ini diatur dalam Peraturan Daerah nomor

08 Tahun 2004. Peran kelembagaan perangkat pemerintahan daerah ini terutama dirasa urgen tatkala berkaitan dengan perlunya pelayanan publik yang prima hingga di level terbawah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan, warga masyarakat misalnya diberikan pelayanan pembuatan kartu identitas penduduk secara cepat dan murah. Sedangkan pelayanan publik di tingkat kantor Desa/Kelurahan misalnya berkaitan dengan kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **2.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin membaiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Partisipasi pemuda dalam pembangunan semakin membaik seiring dengan kesadaran dan kepedulian akan mutu lingkungan dan kesehatan yang makin meluas di kalangan masyarakat. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai melalui berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang rentan masalah sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian, kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah.

#### **2.3.1.8. Politik**

Dalam bidang pembangunan politik, isu lokal tidaklah bisa dilepaskan dari isu nasional. Perubahan politik di tingkat nasional senantiasa akan mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal. Itulah sebabnya, sejak bergulirnya reformasi politik tahun 1998, di wilayah Tapin juga mengalami semacam euforia politik. Jumlah cabang dan ranting Partai Politik yang berpusat di Jakarta juga merebak, dan pada tahun 2004 ketika Pemilu Legislatif dilaksanakan jumlah mereka yang berkiprah sebagai pengurus partai politik mencapai 200 orang yang mewakili kepengurusan 20 partai politik. Perkembangan kedepan diprediksikan kegiatan pembangunan politik melalui proses pengkaderan di tingkat partai politik lokal akan

menjadi faktor strategis apabila disinergikan dengan tugas fungsional Pimpinan Daerah sebagai pembina kepolitikan lokal.

### **2.3.2. Pelayanan Pilihan**

#### **2.3.2.1. Pertanian**

- Potensi Lahan.

Luas potensi lahan, baik berupa lahan sawah maupun lahan kering di Kabupaten Tapin tahun 2004 yang dapat digunakan untuk tanaman pangan telah mencapai kurang lebih 135.734 Ha, namun yang dimanfaatkan/difungsikan baru mencapai seluas 82.635 Ha atau baru 60,8 persen. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman padi selama tahun 2004 adalah 74.217 Ha, lahan sawah irigasi yang dapat ditanami dua kali setahun 4.499 Ha dan satu kali setahun 69.718 Ha. Untuk sawah lahan tadah hujan yang dapat ditanami padi dua kali setahun seluas 1.631 Ha dan satu kali setahun 11.951 Ha, sedangkan lahan rawa yang dapat ditanami padi dua kali setahun seluas 4.281 Ha dan satu kali setahun seluas 32.375 Ha. Lahan kering hanya ditanami sekali setahun seluas 17.516 Ha.

- Luas Tanam

Luas tanam padi sawah selama kurun waktu 1995 – 2005 cukup berfluktuasi, tahun 1995 luas tanam 40.395 Ha dan tahun 2000 menurun menjadi 37.851 Ha namun pada tahun 2005 kembali meningkat menjadi 57.889 Ha, secara rata-rata dari tahun 1995-2005 mengalami peningkatan 3,66 persen per tahun sedangkan Luas tanam padi ladang juga berfluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan, dari 3.139 Ha (1995) dan turun menjadi 2.562 Ha (2005) atau mengalami penurunan rata-rata 2,01 persen per tahun, Secara total luas tanam padi 43.534 Ha (1995) dan tahun 2005 meningkat menjadi 60.451

Ha atau selama periode 1995 – 2005 mengalami peningkatan rata-rata 3,34 persen per tahun dan untuk luas tanam palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) juga mengalami penurunan rata-rata 2,13 persen per tahun dari 5.208 Ha (1995) menjadi 4.198 Ha (2005), dimana areal tanam terluas adalah jagung dan kacang tanah.

- Luas panen

Luas panen padi sawah selama kurun waktu 1995 – 2004 rata-rata mengalami peningkatan 3,77 persen per tahun dari 37.671 Ha (1995) meningkat menjadi 54.552 Ha (2005), Sebaliknya luas panen padi ladang mengalami penurunan, dari 2.777 Ha (1995) dan turun menjadi 2.279 Ha (2005) atau mengalami penurunan rata-rata 1,96 persen per tahun sedangkan untuk palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) juga mengalami penurunan rata-rata 1,26 persen per tahun dari 5.094 Ha (1995) menjadi 4.483 Ha (2005).

- Bila ditinjau dari sisi produksi perkembangan komoditi tanaman pangan dari tahun 1995 – 2005 adalah sebagai berikut :

- Produksi padi selama kurun waktu 1995 – 2005 cukup stabil, kecuali pada tahun 2000 yang mengalami penurunan cukup tajam (produksi hanya mencapai 137.439 ton). Walaupun secara rata-rata ada peningkatan, tetapi peningkatannya hanya sedikit sekali, yaitu hanya 1,64 persen per tahun dari 166.659 Ton (1995) menjadi 196.181 ton (2005).

- Produksi palawija yang cukup menonjol di Kabupaten Tapin adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau, akan tetapi hampir keseluruhan produksinya sangat berfluktuasi bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Selama periode 1995 – 2005 produksi palawija mengalami peningkatan rata-rata hanya 0,74 persen per tahun.

- Produksi jagung dari tahun 1995 – 2005 rata-rata mengalami peningkatan hanya sebesar 0,49 persen per tahun. Besarnya produksi jagung tahun 1995 adalah 2.045 Ton, sedangkan tahun 2005 menjadi 2.147 Ton, dengan produksi tertinggi tahun 1997 yang mencapai 4.842 Ton.
- Produksi ubi kayu juga mengalami peningkatan yang tidak begitu tinggi dari 2.037 Ton tahun 1995 menjadi 2.262 Ton tahun 2005, atau mengalami peningkatan rata-rata 1,05 persen per tahun. Produksi tertinggi yang bisa dicapai adalah 3.622,1 ton tahun 2000, dan produksi terendah tahun 2004 yaitu hanya sebesar 844 ton.
- Produksi ubi jalar berfluktuasi tahun 1995 – 1998 mengalami peningkatan rata-rata per tahun 76,91 persen kemudian pada periode tahun 1999, menurun drastis sebesar 64,1 persen. Secara keseluruhan periode 1995 – 2005 produksi ubi jalar mengalami peningkatan rata-rata 12,65 persen per tahun.
- Produksi kacang tanah juga cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak begitu besar, hanya 0,48 persen rata-rata per tahun dari 3.554 ton (1995) menjadi 3.730 ton (2005).
- Produksi kacang hijau tahun 1995 sebesar 52,31 ton turun menjadi 31 ton tahun 2005, rata-rata turun 5,10 persen per tahun.
- Buah-buahan yang dihasilkan Kabupaten Tapin beraneka ragam, yaitu mangga, rambutan, jeruk, pisang, dan lain-lain. Secara keseluruhan produksi buah-buahan tahun 1995 sebesar 2.092,4 Ton dan cenderung terus meningkat hingga tahun 2005 mencapai 81.470,20 ton. Rata-rata peningkatan produksi buah-buahan sebesar 44,22 persen per tahun.
- Sayur-sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Tapin adalah kacang panjang, terong, mentimun, bayam dan lain-

lain. Secara keseluruhan produksi sayur-sayuran selama periode 1995 – 2005 mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen per tahun yaitu dari 416,78 Ton (1995) menjadi 466,9 ton (2005). Produksi terbesar yang pernah dicapai adalah 696,40 Ton tahun 1999.

- Jika ditinjau dari sisi produktifitasnya perkembangan komoditi tanaman pangan dari tahun 1995 – 2005 adalah sebagai berikut :
  - Produktivitas padi turun dari 41,20 Kw/Ha (1995) menjadi 33,33 Kw/Ha (2005) atau mengalami penurunan rata-rata 2,10 persen per tahun. Pencapaian produktivitas padi Kabupaten Tapin tahun 2005 bila dibandingkan dengan Kalimantan Selatan lebih rendah. Produktivitas padi Kalimantan Selatan 34,79 Kw/Ha. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya petani yang menggunakan benih unggul atau bersertifikat, disamping masih banyaknya petani yang menggunakan pupuk dan pestisida tidak sesuai rekomendasi.
  - Produktivitas jagung naik dari 13,37 Kw/Ha (1995) menjadi 15,82 Kw/Ha (2005) atau meningkat rata-rata 1,69 persen per tahun. Pencapaian ini juga sangat rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan yang pada tahun 2005 mencapai produktivitas 30,83 Kw/Ha.
  - Produktivitas ubi kayu meningkat dari 83,14 Kw/Ha (1995) menjadi 97,92 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 1,65 persen per tahun. Walaupun produktivitas ubi kayu mengalami peningkatan tetapi masih dibawah capaian Kalimantan Selatan (133,10 Kw/Ha).
  - Produktivitas ubi jalar juga mengalami peningkatan yang tajam dari 52,40 Kw/Ha (1995) menjadi 98,57 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 6,52 persen per tahun. Dengan peningkatan yang cukup besar inipun ternyata

capaian tahun 2005 masih lebih rendah dari Kalimantan Selatan (99,11 Kw/Ha).

- Produktivitas kacang tanah mengalami sedikit peningkatan dari 11,04 Kw/Ha (1995) menjadi 13,11 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 1,73 persen per tahun. Dilihat dari produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tapin, hanya kacang tanahlah yang pada tahun 2005 capaiannya melebihi Kalimantan Selatan (11,47 Kw/Ha). Hal ini bisa membuat kacang tanah sebagai komoditas unggulan, terlebih lagi dengan semakin berkembangnya usaha kecil dan menengah pengolahan hasil produksi pertanian.
- Produktivitas kacang hijau juga meningkat dari 7,17 Kw/Ha (1995) menjadi 11,07 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 4,45 persen per tahun. Tahun 2005 capaian Kabupaten Tapin melampaui Kalimantan Selatan (10,78 Kw/Ha).
- Produktivitas buah-buahan pada tahun 2005 adalah 230,1 Kw/Ha, turun cukup besar dibandingkan dengan tahun 2003 yang produktivitasnya mencapai 309,9 Kw/Ha. Secara total produktivitas buah-buahan Kabupaten Tapin jauh melampaui Kalimantan Selatan (132,90 Kw/Ha) dan Nasional (187,70 Kw/Ha).
- Produktivitas sayuran selama periode tahun 1996 – 2004 mengalami peningkatan rata-rata 13,04 persen per tahun yaitu dari 4,35 Kw/Ha (1996) menjadi 11,6 Kw/Ha per tahun. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Tapin masih sangat rendah begitu pula halnya dengan tingkat produktivitasnya. Capaian produktivitas sayuran Kabupaten Tapin tahun 2004 masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Nasional yang masing-masing 33,50 Kw/Ha dan

93,90 Kw/Ha. Untuk mencukupi kebutuhan sayuran Kabupaten Tapin masih mendatangkan dari Jawa.

#### **2.3.2.2. Perkebunan**

Komoditas perkebunan yang memberikan hasil cukup signifikan adalah karet, kelapa, aren dan sagu. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, areal tanaman menghasilkan karet tidak banyak mengalami penurunan hanya rata-rata 3,95 persen per tahun, yaitu dari 7.854 Ha (1995) menjadi 5.247 Ha (2005). Areal tanaman menghasilkan kelapa justru mengalami sedikit peningkatan dari 1.242 Ha (1995) menjadi 1.343 Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 0,78 persen per tahun. Areal tanaman menghasilkan aren menurun dari 31 Ha (1995) menjadi 24 Ha (2004) atau mengalami penurunan rata-rata 2,53 persen per tahun. Sedangkan sagu dari tahun 1995 – 1999 areal tanaman menghasilkan tidak mengalami perubahan yaitu seluas 275 Ha, tetapi di tahun 2000 justru meningkat pesat menjadi 838 Ha dan 842 Ha di tahun 2004. Secara keseluruhan dari tahun 1995 – 2004 areal tanaman menghasilkan sagu meningkat rata-rata 13,24 % per tahun, Pembangunan kebun karet yang ada dilaksanakan melalui beberapa pola yaitu Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Pola Unit Pelaksanaan Proyek (UPP), Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Pola Swadaya. Areal tanam menghasilkan terluas adalah PIR, sedangkan swadaya areal tanam yang belum menghasilkan yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya keragaman pembangunan kebun karet di Kabupaten Tapin

Produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Tapin dari tahun 1995 - 2005 dapat digambarkan sebagaimana berikut :

- Produksi komoditi perkebunan yang menonjol di Kabupaten Tapin adalah karet, sagu, kelapa, dan aren.
- Produksi karet selama kurun waktu 11 tahun (1995 - 2005) mengalami penurunan dari 6.896,10 Ton menjadi 4.643,71 Ton

atau rata-rata mengalami penurunan 3,88 persen per tahun. Rata-rata produksi karet per hektar mengalami sedikit peningkatan dari 878,4 Kg/Ha (1995) menjadi 885,02 Kg/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata hanya 0,08 persen per tahun.

- Produksi kelapa selama kurun waktu 11 tahun (1995 - 2005) mengalami penurunan dari 1.320 ton menjadi 983,93 ton atau rata-rata mengalami penurunan 2,90 persen per tahun. Rata-rata produksi kelapa per hektar juga mengalami penurunan dari 1.062,80 Kg/Ha (1995) menjadi 732.64 Kg/Ha (2005) atau turun rata-rata 3,65 persen per tahun.
- Produksi aren selama kurun waktu 11 tahun (1995 - 2005) mengalami penurunan dari 48,95 ton menjadi 28,62 ton atau rata-rata mengalami penurunan 5,23 persen per tahun. Rata-rata produksi aren per hektar juga mengalami penurunan rata-rata 2,77 persen per tahun dari 1.579,03 Kg/Ha (1995) menjadi 1.192,50 Kg/Ha (2005).
- Produksi sagu selama kurun waktu 10 tahun (1995 - 2004) mengalami peningkatan dari 6.678,95 Ton menjadi 7.582 ton atau rata-rata mengalami peningkatan 1,42 persen per tahun. Pada tahun 2004 rata-rata produksi sagu adalah 9.004,75 Kg/Ha.

Begitu pula dengan perkebunan Kelapa Sawit sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Tapin, bahkan tahun 2006/2007 investor asing sudah merealisasikan lokasi perkebunan di Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan mencapai 50 ribu hektar. Lokasi perkebunan kelapa sawit dinilai sangat strategis sebab klasifikasi rawa tidak terlalu dalam, air pasang surut normal serta teknologi antara air dan akar sawit memiliki jarak 20 cm yang berfungsi untuk menstabilkan serapan air, perusahaan kelapa sawit di Margasari ini akan menyerap tenaga kerja 103 orang untuk 1

hektar lahan, hasil sawit tidak hanya untuk produksi minyak melainkan juga mampu digunakan untuk 100 macam manfaat seperti biodiesel, pengganti solar dan lainnya. Selain letak perusahaan di Margasari sangat strategis juga daerahnya subur dan dapat dipastikan Margasari akan menjadi kota ekonomi ke depannya dengan akses Marabahan-Kapuas-Banua Anam.

### **2.3.2.3. Peternakan dan Perikanan**

Kondisi Peternakan. Selama periode tahun 1995 – 2005 jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan sebagian ternak kecil (domba dan babi) cenderung menurun, kecuali kambing yang jumlahnya menunjukkan trend yang meningkat, sedangkan ternak unggas (ayam buras, ayam broiler dan itik) populasinya meningkat cukup pesat yaitu dari 734.908 ekor menjadi 1.393.216 ekor (rata-rata meningkat 8,32 persen /tahun), Secara keseluruhan populasi ternak di Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 8,03 persen per tahun dimana tahun 1995 berjumlah 765.560 ekor menjadi 1.409.926 ekor pada 2005 sedangkan untuk perkembangan populasi ternak unggas sendiri mengalami pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan mencapai 8,32 persen per tahun (1995 – 2005). Perkembangan yang paling pesat terjadi pada ternak ayam ras pedaging, dari 210.600 ekor menjadi 561.756 ekor (meningkat rata-rata 16,67 persen per tahun). Ayam buras juga mengalami peningkatan, yaitu rata-rata 3,29 persen per tahun (dari 520.800 ekor menjadi 692.105 ekor), sedangkan itik populasinya juga terus meningkat dengan rata-rata 14,84 persen per tahun (1998 – 2005), yaitu dari 68.357 ekor (tahun 1998) menjadi 139.355 ekor (tahun 2005). Di masa mendatang diharapkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan sampai operasional pada segala aspek kegiatan menuju kepada pembangunan agribisnis peternakan melalui pembinaan dan visualisasi agribisnis mampu menunjang pembangunan peternakan, terutama untuk

menyongsong pembangunan agribisnis peternakan dan menghadapi kemajuan teknologi peternakan pada era globalisasi yang sangat kompetitif.

Kondisi Perikanan. Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan di kolam, karamba, dan sawah (minapadi). Pada tahun 2005, budidaya ikan di kolam seluas 36,2 Ha, budidaya ikan di karamba seluas 2,5 Ha dan budidaya minapadi seluas 73,6 Ha. Rata-rata areal budidaya perikanan bersifat konstan dari selama periode 2004-2005, kecuali jumlah budidaya keramba dari 1.400 unit tahun 2004 menjadi 2.000 unit tahun 2005 dan untuk budidaya pembibitan ikan dilakukan melalui usaha pembenihan rakyat dan mengalami kenaikan luas areal 27,2 persen, yaitu 4,77 Ha (2004) menjadi 5,27 Ha (2005)

Sektor perikanan terus dikembangkan dengan melaksanakan pembangunan fasilitas diantaranya :

- Pembangunan Balai Bibit Benih Ikan (BBI) disamping bendung/Irigasi Linuh dengan kapasitas 15 juta anak ikan berbagai jenis termasuk ikan lokal.
- Pengembangan perikanan keramba di sepanjang Sungai Margasari Kecamatan Candi Laras Selatan dan Candi Laras Utara.
- Pengembangan perikanan tambak/ kolam didesa pampain Kecamatan Tapin Selatan dan desa Linuh Kecamatan Bungur.

#### **2.3.2.4. Kehutanan**

Luas kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin seluas 37.185 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap 3.750 ha, hutan produksi terbatas 5.125 ha, hutan lindung 11.250 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 17.060 ha, sempadan sungai 1.705 ha. Hutan tersebut tersebar pada 12 kecamatan dengan fisiografi yang beragam

berupa rawa, dataran rendah dan dataran tinggi. Selain itu juga terdapat hutan rakyat seluas 5.208 ha, Kondisi ekologis dan biologis kawasan hutan di Kabupaten Tapin didominasi oleh jenis vegetasi seperti meranti, sungkai, galam, merapat untuk hutan alam dengan berbagai kondisi fisiografi sedangkan di hutan rakyat terdapat sengon dan jati. Selain vegetasi pohon juga terdapat potensi hasil hutan non kayu berupa purun, rumbia, madu, empon-empon, rumbia dan bambu.

Rehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal dan berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders, menjamin keseimbangan sistem lingkungan dan tata air DAS, serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan. Sasaran RHL yang berada dalam kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan di luar kawasan hutan tidak sebatas teknis tanam-tenanam akan tetapi sudah berada pada tataran lanskap fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan sehingga secara simultan dapat memulihkan dimensi fisik sumber daya hutan, ekosistem hutan, tata sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam 20 tahun mendatang dibidang kehutanan secara global akan semakin kompetitif sementara kemampuan sumber daya hutan Indonesia untuk menghasilkan dan untuk pulih sangat berkurang. Sehingga perlu dikembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mampu menunjang pembangunan kehutanan dimasa yang akan datang baik yang terkait dengan sistem budidayanya maupun sistem teknologi pengolahan hasil hutannya.

#### **2.3.2.5. Perindustrian**

Sektor industri Kabupaten Tapin selama periode 1998 – 2004, tumbuh rata-rata 2,47 persen dan tenaga kerja yang terserap pada sektor ini rata-rata tumbuh sebesar 1,94 persen per tahun. Sedangkan investasi yang

ditanamkan rata-rata tumbuh sebesar 29,08 persen per tahun. Selama lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir, kelompok industri yang menjadi tulang punggung sektor industri di Kabupaten Tapin ini adalah Agro-industri dan Hasil Hutan yang terlihat dari jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, investasi dan produksi yang lebih besar dari pada kelompok industri lainnya selama periode tersebut, dari kelompok Industri, unit usaha yang terbesar adalah Industri Anyaman Rotan/Purun/Bambu yang termasuk dalam industri kerajinan rakyat. Sentra Industri Anyaman di Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Selain itu, industri yang berbasis dan menggunakan bahan baku dari sektor pertanian dan berskala menengah adalah industri makanan dan pengolahan karet, sebagian besar skala usaha pada sektor Industri masih berskala kecil dan pemasaran produknya tidak hanya terbatas lokal/sekitar wilayah Kabupaten Tapin, namun sudah mencapai kawasan regional dan nasional seperti ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan, Jawa Timur, Bali dan Jakarta.

Berdasarkan perkembangan produksi sektor industri yang terbagi dalam kelompok Industri Logam Mesin dan Elektronika (Bengkel Sepeda, Reparasi Sepeda Motor, Pandai Besi, Bengkel Mobil), Industri Kimia (Batu Bata, Volkanisir Ban Dalam, Gipsun, Sablon Kecantikan, Arang Kayu), Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (Anyaman Purun/ Bambu, Gula Aren, Penggajian Kayu, Peti Buah/Kemas) dan Industri Aneka (Penjahit Pakaian, Tali temali, Reparasi Radio/TV) maka sektor industri Kabupaten Tapin dalam dua dekade ke depan akan mengalami pertumbuhan dengan sektor Industri kecil, Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan dan Industri Rumah Tangga yang menjadi leading sektor industri.

#### **2.3.2.6. Perdagangan**

Perkembangan sektor perdagangan banyak mengalami pertumbuhan dari tahun 2000 (1189 buah), tahun 2001 (1292 buah), tahun 2002 (1334) tahun 2003 (1469 buah) dan tahun 2004 (1587 buah). Perkembangan

yang terjadi pada perusahaan pedagang menengah dari 114 buah (2001), 202 buah (2002), 225 buah (2003) dan 235 buah (2004) dan Perusahaan Pedagang Kecil mengalami fluktuatif dari 1178 buah (2001), turun 1128 buah (2002) dan naik lagi menjadi 1240 buah (2003), 1345 buah (2004). Pertumbuhan rata-rata perusahaan pedagang tahun 2000-2004 untuk pedagang besar 18,75 persen, pedagang menengah 24,89 persen, pedagang kecil 5,63 persen, sedangkan secara keseluruhan mencapai 7,31 persen. Potensi pengembangan sektor perdagangan cukup menjanjikan karena penduduk Kabupaten Tapin yang bekerja pada sektor ini mencapai 16,40 persen, sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian yang mencapai 60,06 persen dan untuk perkembangan yang terjadi pada sektor perkoperasian dan UKM mengalami peningkatan kualitas namun secara kuantitas tidak terlalu nampak. Selama 5 tahun terakhir dari 1999-2003 jumlah koperasi mengalami peningkatan rata-rata jumlah koperasi 5,02 persen, jumlah anggota 2,12 persen, volume usaha 1,74 persen, modal sendiri 17,91 persen dan asset 22,92 persen.

Berdasarkan perkembangan jumlah pedagang pada sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM maka sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin pada dua dekade ke depan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 5,4 persen

#### **2.3.2.7. Pelayanan Umum**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, peran Kecamatan (yang dipimpin Camat) dan Desa/Kelurahan (yang dipimpin Kepala Desa/Kelurahan) sangat penting. Eksistensi Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kabupaten Tapin ini diatur dalam Peraturan Daerah nomor 08 Tahun 2004. Peran kelembagaan perangkat pemerintahan daerah ini terutama dirasa urgen tatkala berkaitan dengan perlunya pelayanan publik yang prima hingga di level terbawah yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Untuk pelayanan publik di tingkat

kecamatan, warga masyarakat misalnya diberikan pelayanan pembuatan kartu identitas penduduk secara cepat dan murah. Sedangkan pelayanan publik di tingkat kantor Desa/Kelurahan misalnya berkaitan dengan kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengelolaan pelayanan dilakukan oleh berbagai instansi perangkat daerah yang berdampak pada terjadinya duplikasi persyaratan dan prosedur, sehingga pada tahun 2007 dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi sebagai pengelola pelayanan di Kabupaten Tapin untuk perizinan dan untuk non perizinan dikelola oleh instansi terkait.

## 2.4. Aspek Daya Saing

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat pada aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya pengeluaran rumah tangga berhubungan erat dengan tingkat konsumsi rumah tangga itu sendiri walaupun dipengaruhi juga oleh beberapa hal yang lain seperti jumlah anggota rumah tangga dan kebiasaan lingkungan tempat tinggal

Tabel 11 : Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Tapin Tahun 2003 sd 2005

Golongan Pengeluaran	Persentase Rumah Tangga		
	2003	2004	2005
< 900.000	51,77	38,53	40,14
900.001 – 1.450.000	30,33	46,23	38,5
>1.450.000	17,9	15,24	21,36
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2003-2005

Tabel di atas menunjukkan rumah tangga mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari atau sama dengan Rp.900.000 perbulan menurun dari sebesar 51,77 persen pada tahun 2003 menjadi 38,53 persen pada tahun 2005. Demikian pula dengan yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 900.001,00 sampai dengan Rp. 1.450.000,00 tercatat, hal ini

berarti tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tapin meningkat dilihat dari tingkat konsumsi pengeluaran rumah tangga

## 2.4.2. Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

### 2.4.2.1. Jalan

Kondisi jalan yang memadai dan aman untuk transportasi mutlak diperlukan oleh berbagai pihak baik untuk kelancaran pembangunan itu sendiri maupun untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tabel 12 : Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Jalan Tahun 2001 sd 2005 (km)

Kondisi Jalan	2001	2002	2003	2004	2005
Baik	125	125	125	126,40	126,40
Sedang	77,50	77,50	77,50	132,10	132,10
Rusak	145,45	145,45	145,45	100,95	100,95
Rusak Berat	147,70	147,70	147,70	136,20	136,20
Jumlah	495,65	495,65	495,65	495,65	495,65

Sumber *Tapin Dalam Angka*

Panjang jalan negara yang melewati Kabupaten Tapin hingga tahun 2005 adalah 47,36 km dengan kondisi baik. Sedangkan jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tapin adalah sepanjang 40,99 km, dengan 100 persen dalam kondisi baik. Jalan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2005 adalah sepanjang 495,65 km dengan rincian 126,40 persen dalam kondisi baik, 132,10 persen dalam kondisi sedang, 100,95 persen dalam kondisi rusak dan 136,20 persen dalam kondisi rusak berat.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tapin membawa konsekuensi semakin bertambahnya jumlah angkutan darat sebagai sarana transportasi bagi penduduk. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat Tapin

#### **2.4.2.2. Air Bersih**

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tapin tiap tahunnya meningkat, karena itu diperlukan dukungan sarana/ prasarana yang sesuai. Penduduk yang menggunakan sarana air bersih pada tahun 2003 di Kabupaten Tapin adalah sebanyak 25.335 (62,05 %) dari jumlah 40.825 KK, sedangkan pada tahun 2004 persentase penduduk yang menggunakan sarana air bersih sebanyak 15.553 (38 %) dari jumlah 40.825 KK. Tentunya Permintaan pelayanan air bersih masyarakat selalu meningkat setiap tahun, selama 10 tahun terakhir peningkatan jumlah penduduk terhadap penggunaan air bersih rata-rata sebesar 8,65 persen per tahun. Melihat perkembangan dari tahun ke tahun yang cukup besar maka diperkirakan kebutuhan penduduk Kabupaten Tapin akan air bersih pada tahun 2020 berkisar sampai dengan 520,68 (LT/DT) dan 1.321,28 (LT/DT) pada tahun 2025. Penambahasan kapasitas IPA baru di lokasi IPS lama akan memberikan tambahan debit pemasokan baru serta memberikan manfaat maksimum apabila PDAM kedepan berhasil meningkatkan minat berlangganan dari masyarakat (calon pelanggan).

#### **2.4.2.3. Listrik**

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dari 29.243 pelanggan pada tahun 2002 menjadi 31.616 pelanggan pada tahun 2007 dengan kapasitas daya terpasang sebesar 19.570.870 (VA) pada tahun 2002 dan 40.753.366 (VA) pada tahun 2007.

#### **2.4.3. Iklim Berinvestasi**

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi iklim untuk berinvestasi adalah perlindungan atau jaminan keamanan. Kabupaten Tapin dengan laju pembangunan yang sangat pesat juga mempunyai permasalahan dalam bidang keamanan. Berbagai upaya telah dilaksanakan demi terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Tabel 13 : Banyaknya Peristiwa Kejahatan Tahun 2001-2005

Tahun	Jumlah Peristiwa
2001	118
2002	114
2003	105
2004	115
2005	119
Jumlah	571

Sumber Kabupaten Tapin Dalam Angka

Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah banyak terjadi beberapa peristiwa kejahatan sebagai dampak sosial dari semakin berkembangnya Kabupaten Tapin. Berdasarkan data dari Polres Tapin yang dilaporkan oleh BPS Kabupaten Tapin dalam Kabupaten Tapin Dalam Angka beberapa tahun terakhir, peristiwa tindak kejahatan di dominasi oleh curat, curanmor, curbis, penggelapan, narkoba dan penipuan.

#### **2.4.4. Sumber Daya Manusia**

##### **2.4.4.1. Struktur Umur**

Dilihat dari struktur umur penduduk Kabupaten Tapin, menurut SUSENAS tahun 2004, menunjukkan ciri-ciri kelompok umur muda, sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Hal ini ditandai dengan besarnya persentase penduduk yang berumur 0-14 tahun yaitu; 30,26 persen, dan penduduk umur 15-64 tahun sebesar 65,69 persen, sedangkan penduduk yang berumur 65 tahun keatas hanya sebesar 4,04 persen. Yang menarik adalah bahwa, persentase penduduk wanita pada kelompok usia 15-64 dan kelompok umur 65 ke atas lebih besar dari pada persentase penduduk laki-laki pada kelompok yang sama. Hal ini membuktikan bahwa umumnya harapan hidup wanita lebih tinggi dari pada laki-laki. Keadaan yang demikian memperlihatkan perkembangan yang baik, dimana jumlah usia produktif dan usia tua meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ratio beban ketergantungan semakin berkurang dan tingkat kesehatan semakin baik. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah

masih tingginya tingkat kelahiran karena golongan umur muda dan balita masih tinggi.

#### **2.4.4.2. Struktur Sosial**

Struktur sosial masyarakat Tapin terbentuk dari suku asli (Banjar dan Dayak Meratus) dan suku pendatang, terutama dari sub etnis Madura dan Jawa. Penduduk dari sub etnis Banjar sebenarnya merupakan kelompok dominan (sekitar 82% penduduk Tapin) dan terutama bermukim di dataran rendah hingga wilayah rawa di bagian Barat dan Selatan Tapin. Sedangkan penduduk dari sub etnis Dayak Meratus, yang populasinya sekitar 1 persen dari penduduk kabupaten, terutama bermukim di dataran tinggi pegunungan Meratus yang secara administratif antara lain berada di wilayah Kecamatan Piani. Untuk penduduk pendatang, khususnya dari sub etnis Jawa, jumlahnya mencapai 16 persen penduduk kabupaten dan terutama bermukim di wilayah kecamatan Binuang. Penduduk dari Jawa ini pertama kali datang menetap di wilayah Tapin dalam rangka Program Transmigrasi Angkatan Darat (transad) tahun 70-an, sedangkan pendatang dari sub etnis Madura, meskipun jumlahnya kurang dari 1 persen penduduk kabupaten, terutama bermukim di daerah Tambarangan dan sekitarnya; semula dengan status seperti halnya kelompok transmigran di kecamatan Binuang, tetapi berpola swakarsa, Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini adalah terutama pembinaan untuk masyarakat terasing, khususnya dari kelompok masyarakat Dayak Meratus. Sejak tahun 1995 program pembinaan masyarakat terasing yang merupakan program Departemen Sosial Republik Indonesia meliputi 3 komunitas dan pertama kali dilakukan pada komunitas Pipitak Jaya. Pola pembinaan yang dilakukan antara lain adalah pemberdayaan masyarakat terasing dengan mengadopsi pola pemukiman kembali (resettlement) karena pola hidup mereka umumnya masih mengacu pada pola ladang berpindah. Pembinaan pola

pemukiman kembali ini tercatat cukup berhasil di Desa Pipitak Jaya dan Harakit, yang sejak tahun 2005 diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Ukuran keberhasilan program ini adalah warga komunitas dapat mengakses fasilitas kehidupan yang lebih baik, misalnya penggunaan listrik untuk penerangan, karena mereka telah bermukim menetap di suatu tempat tertentu.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Kepadatan penduduk menurut Sensus tahun 1980 rata-rata sebesar 40,20 jiwa per km<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 1990 sebesar 46,89, tahun 2000 sebesar 52,31, dan pada tahun 2005 mencapai 55 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan antar Kecamatan cukup variatif, Kecamatan Candi Laras Utara merupakan daerah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yaitu 14 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tapin Utara sebesar 270 jiwa per km<sup>2</sup> merupakan Kecamatan yang terpadat penduduknya di Kabupaten Tapin. Dengan kecenderungan pertumbuhan itu, tekanan populasi atas ketersediaan ruang dan sumberdaya akan semakin besar.

Oleh karena itu, tantangan pembangunan secara jangka panjang adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan memperhatikan keseimbangan proporsi penduduk usia produktif dan non-produktif serta distribusi penduduk antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas penduduk khususnya perempuan sehingga dapat menjadi potensi pembangunan yang produktif serta perhatian pada rumah tangga miskin agar pertumbuhan penduduk pada golongan ini tidak menjadi beban pembangunan.

##### **a. Tata Ruang**

Dalam pembangunan jangka panjang ke depan, krisis tata ruang merupakan ancaman besar bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan Kabupaten Tapin mengalami ancaman serupa, seiring dengan fenomena konversi lahan pertanian ke non pertanian, pembukaan lahan bagi pemukiman akibat pertumbuhan penduduk, perambahan hutan sebagai sumber pendapatan penduduk, serta perluasan investasi pemanfaatan sumberdaya alam. Kecenderungan ini memberi tekanan atas konsistensi pemanfaatan ruang antara ruang untuk kawasan perlindungan dengan ruang untuk kawasan budidaya.

Tantangan ke depan adalah dijalkannya penataan ruang yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai; 1) arahan bagi lokasi kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat, 2) arahan bagi batasan kemampuan lahan terutama terkait daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, 3) arahan untuk efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang, serta 4) arahan transformasi *sosio-spasial* pada wilayah tertentu dari ciri perdesaan ke ciri perkotaan.

#### **b. Lingkungan Hidup**

Saat ini luas lahan kritis di Kabupaten Tapin mencapai 17.557 ha, sementara itu debit air sungai berkurang dari tahun ke tahun, lahan sawah sudah mulai menurun kapasitas hara akibat pemupukan, pencemaran akibat aktivitas pertambangan bahan galian.

Ancaman kedepan adalah dampak perubahan iklim global, dimana peristiwa kekeringan bisa lebih panjang pada musim kemarau dan intensitas curah hujan bisa lebih tinggi dan lama pada musim hujan. Ini tidak hanya membawa ancaman bagi peristiwa bencana alam, tetapi dalam jangka panjang dan skala luas kerusakan lingkungan hidup dapat berkontribusi bagi krisis air, krisis pangan dan krisis kesehatan.

Tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengkonservasi dan merehabilitasi lingkungan, mencegah dan mengendalikan dampak perusakan lingkungan dari investasi swasta, serta mempromosikan dan menyadarkan masyarakat luas tentang urgensi pertanian organik ramah lingkungan tidak hanya karena alasan lingkungan hidup tetapi juga karena alasan kesehatan.

#### **c. Perekonomian**

Meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, pembangunan ekonomi saat ini masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Pasca krisis tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tapin pada tahun 2000 mencapai 2,05 persen, tahun 2002 mencapai 4,17 persen, tahun 2005 mencapai 3,49 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2003 mencapai 4,71 persen, tahun 2005 mencapai 5,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalan, sementara kontribusi dari sektor pertanian dan bangunan semakin mengalami penurunan. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sektor yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan tersebut, serta mengakselerasi transformasi struktural perekonomian dari dominasi sektor pertambangan, pertanian ke dominasi sektor lainnya.

Kekuatan yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mulai terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dan pertumbuhan sektor-sektor non agribisnis serta ketersediaan infrastruktur ekonomi. Peluang yang dimiliki dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menarik investor sehingga menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Kelemahan yang dihadapi adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih belum memadai untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi dan belum tersedianya peraturan daerah tentang perlindungan investasi.

Secara umum pertanian di Kabupaten Tapin memiliki potensi yang cukup besar untuk pertanian dalam arti luas namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya optimal

Produktivitas padi turun dari 41,20 Kw/Ha (1995) menjadi 33,33 Kw/Ha (2005) atau mengalami penurunan rata-rata 2,10 persen per tahun. Pencapaian produktivitas padi Kabupaten Tapin tahun 2005 bila dibandingkan dengan Kalimantan Selatan lebih rendah. Produktivitas padi Kalimantan Selatan 34,79 Kw/Ha. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya petani yang menggunakan benih unggul atau bersertifikat, disamping masih

banyaknya petani yang menggunakan pupuk dan pestisida tidak sesuai rekomendasi

Untuk komoditas jagung mengalami peningkatan dari 13,37 Kw/Ha (1995) menjadi 15,82 Kw/Ha (2005) atau meningkat rata-rata 1,69 persen per tahun. Pencapaian ini juga sangat rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan yang pada tahun 2005 mencapai produktivitas 30,83 Kw/Ha.

Untuk komoditas ubi kayu meningkat dari 83,14 Kw/Ha (1995) menjadi 97,92 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 1,65 persen per tahun. Walaupun produktivitas ubi kayu mengalami peningkatan tetapi masih dibawah capaian Kalimantan Selatan (133,10 Kw/Ha).

Untuk komoditas ubi jalar juga mengalami peningkatan yang tajam dari 52,40 Kw/Ha (1995) menjadi 98,57 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 6,52 persen per tahun. Dengan peningkatan yang cukup besar ini pun ternyata capaian tahun 2005 masih lebih rendah dari Kalimantan Selatan (99,11 Kw/Ha).

Produktivitas kacang tanah mengalami sedikit peningkatan dari 11,04 Kw/Ha (1995) menjadi 13,11 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 1,73 persen per tahun. Dilihat dari produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tapin, hanya kacang tanahlah yang pada tahun 2005 capaiannya melebihi Kalimantan Selatan (11,47 Kw/Ha). Hal ini bisa membuat kacang tanah sebagai komoditas unggulan, terlebih lagi dengan semakin berkembangnya usaha kecil dan menengah pengolahan hasil produksi pertanian.

Produktivitas kacang hijau juga meningkat dari 7,17 Kw/Ha (1995) menjadi 11,07 Kw/Ha (2005) atau mengalami peningkatan rata-rata 4,45 persen per tahun. Tahun 2005 capaian Kabupaten Tapin melampaui Kalimantan Selatan (10,78 Kw/Ha).

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2005 adalah 230,1 Kw/Ha, turun cukup besar dibandingkan dengan tahun 2003 yang produktivitasnya mencapai 309,9 Kw/Ha. Secara total produktivitas buah-buahan Kabupaten

Tapin jauh melampaui Kalimantan Selatan (132,90 Kw/Ha) dan Nasional (187,70 Kw/Ha).

Produktivitas sayuran selama periode tahun 1996 – 2004 mengalami peningkatan rata-rata 13,04 persen per tahun yaitu dari 4,35 Kw/Ha (1996) menjadi 11,6 Kw/Ha per tahun. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Tapin masih sangat rendah begitu pula halnya dengan tingkat produktivitasnya. Capaian produktivitas sayuran Kabupaten Tapin tahun 2004 masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Nasional yang masing-masing 33,50 Kw/Ha dan 93,90 Kw/Ha. Untuk mencukupi kebutuhan sayuran Kabupaten Tapin masih mendatangkan dari Jawa.

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tapin dijadikan sebagai lumbung padi nasional atau daerah pangan nasional, sebab kualitas dan kuantitas lahan dan varietas serta sumber daya manusia sangat mendukung sehingga pemerintah pusat menetapkan daerah Tapin sebagai pemasok/ penghasil padi yang berkualitas baik

Sementara untuk sektor peternakan, sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tapin, Selama periode tahun 1995 – 2005 jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan sebagian ternak kecil (domba dan babi) cenderung menurun, kecuali kambing yang jumlahnya menunjukkan trend yang meningkat, sedangkan ternak unggas (ayam buras, ayam broiler dan itik) populasinya meningkat cukup pesat yaitu dari 734.908 ekor menjadi 1.393.216 ekor (rata-rata meningkat 8,32 persen /tahun), Secara keseluruhan populasi ternak di Kabupaten Tapin mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 8,03 persen per tahun dimana tahun 1995 berjumlah 765.560 ekor menjadi 1.409.926 ekor pada 2005 sedangkan untuk perkembangan populasi ternak unggas sendiri mengalami pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan mencapai 8,32 persen per tahun (1995 – 2005). Perkembangan yang paling pesat terjadi pada ternak ayam ras pedaging, dari 210.600 ekor menjadi 561.756 ekor (meningkat rata-rata 16,67 persen per tahun). Ayam buras juga mengalami peningkatan, yaitu rata-rata 3,29 persen per tahun (dari 520.800 ekor

menjadi 692.105 ekor), sedangkan itik populasinya juga terus meningkat dengan rata-rata 14,84 persen per tahun (1998 – 2005), yaitu dari 68.357 ekor (tahun 1998) menjadi 139.355 ekor (tahun 2005).

Sektor perikanan mengalami pertumbuhan, Potensi perairan yang bisa dikembangkan untuk kegiatan budidaya ikan di kolam, karamba, dan sawah (minapadi). Pada tahun 2005, budidaya ikan di kolam seluas 36,2 Ha, budidaya ikan di karamba seluas 2,5 Ha dan budidaya minapadi seluas 73,6 Ha. Rata-rata areal budidaya perikanan bersifat konstan dari selam periode 2004-2005, kecuali jumlah budidaya keramba dari 1.400 unit tahun 2004 menjadi 2.000 unit tahun 2005 dan untuk budidaya pembibitan ikan dilakukan melalui usaha pembenihan rakyat dan mengalami kenaikan luas areal 27,2 persen, yaitu 4,77 Ha (2004) menjadi 5,27 Ha (2005).

Produksi komoditas pertanian dapat ditingkatkan apabila didukung oleh penyediaan infrastruktur berupa irigasi dan sarana produksi yang terjangkau. Namun mengingat alih fungsi lahan cenderung meningkat, perluasan areal tanam semakin sulit. Selain itu, secara jangka panjang kondisi ekologis perlu dipertimbangkan demi keberlanjutan, sehingga peningkatan produksi yang idealnya didorong tidak mengandalkan sepenuhnya teknologi an-organik tetapi diimbangi dengan teknologi organik.

Pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Tapin memiliki kekuatan besar, khususnya ternak ruminansia sangat dimungkinkan karena luasnya areal padang penggembalaan yang didukung oleh ketersediaan hijauan makanan ternak. Disamping itu sebagian besar petani menjadikan ternak sebagai usaha sampingan karena nilai ekonominya cukup tinggi.

Angka pengangguran terbuka yang merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, pada tahun 1999 mencapai 2,06 persen. Kemudian, pada tahun 2004 turun menjadi 1,40 persen dan pada tahun 2005 naik lagi menjadi 1,98 persen

Jumlah penganggur berkaitan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, jumlah lapangan kerja yang dapat disediakan semakin besar. Selain itu juga terkait dengan kualitas SDM

dari angkatan kerja. Permasalahan yang dihadapi adalah laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif, tidak seimbang dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 5,03 persen yang berarti telah menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9,05 persen, pada tahun 2005 besarnya penduduk miskin di Kabupaten Tapin mencapai 8,12 persen.

Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 7,19 persen dan pada tahun 2005 sebesar 235 ribu (7,23 persen). Bila dilihat dari data di atas maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tapin relatif rendah bila dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Selatan namun kondisi masyarakat dipedalaman rawan jatuh rawan jatuh miskin karena terbatasnya alternatif kegiatan ekonomi dan akses pelayanan sosial dasar

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mereduksi kemiskinan dengan berdasarkan pada pemahaman kebutuhan masyarakat miskin, serta menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap. Masalah yang dihadapi kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, keterbatasan pemahaman dan komitmen dalam mengembangkan potensi pada wilayah berpenduduk miskin, serta berbagai masalah dalam aspek kultural dan struktural masyarakat miskin itu sendiri.

#### **d. Sosial**

Kualitas manusia ditandai oleh pencapaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Tapin Berdasarkan aspek kualitas dilihat dari

perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin menunjukkan peningkatan, yaitu dari 59,10 pada tahun 1999 menjadi 67,0 pada tahun 2002, sementara angka IPM untuk Kalimantan Selatan pada tahun 2002 menunjukkan angka sebesar 64,3, kemudian pada tahun 2004 naik menjadi 67,9. Sementara Kalimantan Selatan hanya sebesar 66,7. Kemudian pada tahun 2005 IPM mencapai 68,6, sedangkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 67,4. Secara nasional peningkatan ini masih belum seperti harapan yang diinginkan, karena Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin berada pada posisi ke 228 tahun 2004, menjadi peringkat ke 232 pada tahun 2005. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, pada tahun 2004 dan 2005 berada pada posisi ke 4.

Komitmen dan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemerintah provinsi melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan sumberdaya manusia khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan perlu mendapat dukungan pemerintah kabupaten sehingga memungkinkan terjadinya sinergitas sumberdaya pembangunan secara jangka panjang. Pembangunan kesehatan dan pendidikan akan diperhadapkan pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan guna pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta penyediaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesehatan yang memiliki profesionalisme tinggi.

**e. Budaya**

Berbagai tradisi sosial-budaya yang selama ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat telah berkurang aktualisasinya. Begitu pula berbagai prinsip kehidupan yang bersumber dari hikmah kebijaksanaan para tetua dan leluhur dan menjadi substansi kearifan lokal telah berkurang vitalisasinya sebagai pedoman kehidupan. Padahal, unsur nilai dan norma sosial budaya

demikian merupakan basis identitas yang menjadi simbol dari eksistensi tatanan sosial masyarakat Tapin sebagai orang Banjar.

Tantangan kedepan adalah semakin besarnya arus pengetahuan dan nilai dari luar yang memasuki tatanan sosial melalui media informasi khususnya siaran televisi, internet dan telekomunikasi. Penetrasi nilai dan budaya tersebut dapat mengancam kespesifikan karakter dan identitas tatanan sosial sehingga diperlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi nilai, norma, seni dan kearifan lokal-asli dalam merespons secara adaptif-kreatif penetrasi nilai, norma dan pengetahuan yang dibawa oleh media informasi.

#### **f. Kehidupan Beragama**

Data tahun 2005 menunjukkan adanya korelasi antara jumlah tempat ibadah dan lembaga pendidikan berbasis agama dengan jumlah pemeluk agama yang bersangkutan. Di Kabupaten Tapin mayoritas (98,82%) penduduknya beragama Islam sehingga hampir di tiap kampung ada masjid dan minimal langgar/surau/mushalla. Jumlah masjid mencapai 115 buah sedangkan langgar dan surau 453 buah. Meskipun merupakan kelompok minoritas, penganut agama Kristen pun memiliki tempat ibadah mereka, yakni 2 buah gereja. Sedangkan untuk kelompok masyarakat Dayak Meratus yang beragama Hindu Kaharingan memiliki 7 buah balai adat, Sebagai daerah yang cukup agamis, di wilayah Kabupaten Tapin berkembang subur lembaga pendidikan berbasis agama. Di wilayah Kabupaten ini terdapat 13 buah pondok pesantren yang menampung sebanyak 2.648 orang santri. Selain itu sejumlah warga masyarakat juga menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan formal negeri berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang totalnya mencapai 29 buah sekolahan dan menampung 4.909 siswa. Selain itu terdapat juga satu buah sekolah berbasis agama yang dikelola oleh ormas Muhammadiyah dan menampung 84 orang siswa.

Maka untuk fasilitas peribadatan relatif sudah cukup secara kuantitasnya sampai dengan akhir periode RPJP (2025), tinggal pemeliharaan dan peremajaan saja.

Tantangan kedepan adalah arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai agama, semakin menguatnya paham kapitalisme, pluralisme dan liberalisme dalam kehidupan masyarakat sehingga cenderung akan menggeser dan meminggirkan nilai-nilai agama. Pembangunan bidang keagamaan dimasa datang memiliki peluang untuk semakin memerankan agama sebagai sumber etos bagi aktivitas pembangunan, mengingat perannya dalam penciptaan SDM berkualitas yang mampu mentransformasikan potensi dan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

#### **g. Politik**

Dalam bidang pembangunan politik, isu lokal tidaklah bisa dilepaskan dari isu nasional. Perubahan politik di tingkat nasional senantiasa akan mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal. Itulah sebabnya, sejak bergulirnya reformasi politik tahun 1998, di wilayah Tapin juga mengalami semacam euforia politik. Jumlah cabang dan ranting Partai Politik yang berpusat di Jakarta juga merebak, dan pada tahun 2004 ketika Pemilu Legislatif dilaksanakan jumlah mereka yang berkiprah sebagai pengurus partai politik mencapai 200 orang yang mewakili kepengurusan 20 partai politik.

Tantangan dalam pembangunan bidang politik dan demokratisasi dimasa datang adalah penegakan etika dan moralitas sebagai nilai dasar berdemokrasi dan berpolitik, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berdemokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan menjaga serta memastikan penyelenggaraan pemilihan yang taat azas. Kelemahan dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik dewasa ini antara lain masih terjadinya inkonsistensi aturan, penegakan hukum yang belum konsisten dan reformasi hukum dan birokrasi yang belum optimal.

#### **h. Keamanan dan ketentraman masyarakat**

Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan yang berarti dari 121 kali pada 24 jenis/bentuk kriminalitas tahun 2006 menjadi 239 kali pada 24 jenis/bentuk kriminalitas pada tahun 2007.

Kekuatan dalam pembangunan bidang keamanan dan ketertiban terutama peran serta masyarakat yang tinggi dan dukungan yang kuat dari aparat penegak hukum serta kondisi masyarakat yang masih religius.

Salah satu tantangan kedepan adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti kejahatan teknologi elektronik dan kejahatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang keamanan dan ketertiban untuk mencegah dan menekan eksese pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2005 khususnya kelompok usia lanjut mencapai 1.909 jiwa dan 441 orang anak terlantar. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah sampai tahun 2025 adalah penyediaan jaminan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dengan dukungan program dari pemerintah dan pemberdayaan potensi lokal yang tersedia.

#### **i. Sarana dan Prasarana**

Dengan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah seperti saat ini, sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Tapin sudah relatif memadai dalam melayani pergerakan manusia dan barang. Dalam perubahan menuju tahun 2025, kondisi transportasi akan mengalami peningkatan baik dari segi jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana. Hal ini sejalan dengan perkembangan sektor yang ditunjang oleh transportasi. Keberadaan Kabupaten Tapin sebagai kabupaten perlintasan, juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan jaringan prasarana khususnya ruas jalan dan Tapin-Margasari-Marabahan, dengan demikian perkembangan kondisi pada ruas jalan ini membutuhkan perhatian yang baik, terutama dalam kesiapan lahan dan pembatasan izin membangun pada jarak tertentu dari jalan.

Keberadaan beberapa kawasan Rantau Baru, Margasari dan Binuang Baru yang cukup strategis dan kawasan wisata di Kabupaten Tapin maupun

Kabupaten tetangga cukup memberikan andil dalam peningkatan pergerakan di masa depan. Perkembangan produksi komoditas pertanian, eksploitasi pertambangan dan terbangunnya beberapa pusat perdagangan di masa depan membutuhkan antisipasi moda transportasi yang tepat dalam pelayanannya begitu pula jaringan prasarana yang mendukungnya. Selain itu munculnya moda transportasi alternatif dalam melayani masyarakat ke depan akan tetap menjadi perhatian baik yang ada saat ini, juga bilamana muncul di pasaran moda transportasi hemat bahan bakar yang juga dapat dimanfaatkan sebagai angkutan pedesaan.

Sarana dan prasarana irigasi serta sumberdaya air telah berkembang dalam dekade terakhir, namun dalam dua dekade kedepan diperlukan antisipasi berhubung meningkatnya kebutuhan air untuk usaha tani dan air bersih

Tantangan yang perlu dijawab untuk merespons kekurangan sumber air pada masa datang adalah penajaman koordinasi antar instansi terkait dalam menangani kelestarian hutan di hulu sungai, pembangunan waduk/bendung tambahan untuk mengairi sawah tadah hujan, penambahan irigasi desa untuk mengurangi lahan tadah hujan, peningkatan konstruksi untuk bendung semi teknis menjadi bendung teknis serta konstruksi saluran tanah ke saluran permanen, dan pencegahan alih fungsi lahan.

#### **j. Pemerintah Daerah**

Struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Tapin telah ditata untuk sedapat mungkin menjalankan berbagai fungsi yang dibutuhkan dalam kondisi struktur dan kebutuhan personil yang ramping. Tantangan kedepan adalah berfungsinya kelembagaan secara efektif dan efisien sesuai tupoksi masing-masing SKPD serta semakin meningkatnya tuntutan praktek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dibalik penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut.

Adanya legislasi daerah yang melahirkan produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang memberikan dasar hukum/legitimasi pembentukan organisasi perangkat

daerah, merupakan kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Tapin dalam penataan kelembagaannya. Kelemahan terletak pada belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi, serta belum optimalnya koordinasi inter dan antar SKPD sehingga masih ditemui tumpang tindih dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Peluang kedepan yang dapat dimanfaatkan adalah adanya regulasi nasional dan pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tantangan terletak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang belum diimbangi oleh kemampuan SDM pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi informasi di era globalisasi.

Dengan karakteristik wilayah kecamatan di Kabupaten Tapin yang bervariasi antara wilayah dataran tinggi, dataran rendah, menjadikan kebutuhan pelayanan atas masyarakat memerlukan respons yang cepat dan tepat sesuai karakteristik kebutuhannya. Untuk itu, menjadi tantangan bagi pemerintah kecamatan untuk bisa lebih berfungsi dalam merespons berbagai kebutuhan layanan masyarakat tersebut, melalui kewenangan yang didelegasikan kepada kecamatan, khususnya untuk urusan sederhana dan memerlukan penyelesaian cepat.

Komitmen Pimpinan Daerah untuk melimpahkan wewenang kepada camat dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat terutama untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah dan murah serta berdaya lingkup setempat, merupakan kekuatan untuk mengoptimalkan pelimpahan kewenangan tersebut. Peluang yang mendukung upaya optimalisasi pendelegasian kewenangan ini adalah adanya kejelasan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa "Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan kewenangan lain yang dilimpahkan". Ancamannya adalah berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan yang otomatis akan mempengaruhi pola organisasi kecamatan dan cenderung mengabaikan tipologi atau kategorisasi kecamatan.

Desa adalah unit sosiogeografis dimana keberdayaan masyarakat dalam memanifestasikan prakarsa dan keswadayaannya dapat terwujud. Untuk itu, penguatan atas otonomi desa merupakan keniscayaan demi tercapainya otonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan spesifik-lokalitasnya. Tantangan kedepan adalah bagaimana menguatkan kelembagaan dan SDM desa serta memanfaatkan potensi manusia dan modal sosial desa agar desa menjelma menjadi tatanan yang berkualitas dan mandiri.

Kekuatan untuk menangani isu ini adalah adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai desa antara lain Perda tentang Pembentukan BPD, Perda tentang Tatacara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda tentang Alokasi Dana Desa, Perda tentang Tatacara Pembentukan dan Penggabungan Desa serta peraturan perundang-undangan Daerah lainnya yang merupakan bentuk pembinaan pemerintah Daerah menuju penguatan otonomi desa. Kelemahannya adalah belum memadainya kemampuan SDM/perangkat desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di atasnya. Selain itu, inovasi pemerintahan desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa belum memadai, hal ini terlihat pada masih kurangnya peraturan desa yang terbentuk. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan mengenai penetapan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ancamannya

adalah semakin pesatnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas sistem (kebijakan), sumber daya manusia, dan kelembagaan di tingkat desa.

**k. Aparatur**

Meskipun secara kuantitatif sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Tapin sudah memadai, namun belum semua pegawai memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi. Tugas pokok dan fungsi dimaksud mulai dari penyiapan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan, perumusan rencana program/kegiatan, implementasi program/kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menangani isu ini adalah sistem pembinaan karier pegawai yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan kelemahan yang dihadapi adalah kurang siapnya sumber daya aparatur dalam menghadapi globalisasi dan pemanfaatan teknologi dan informasi.

Regulasi perizinan terkait pelayanan publik yang telah dibentuk di Kabupaten Tapin, merupakan kekuatan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan umum kepada masyarakat. Kelemahan terletak pada belum diterapkannya fungsi-fungsi manajemen pada semua jenis pelayanan seperti belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan, kurangnya sumber daya dan penganggaran. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum adalah terjadinya pergeseran paradigma pelayanan dari *Old Public Administration* (OPA) menjadi *New Public Management* (NPM) dan terakhir dikembangkan paradigma *New Public Service* (NPS), yang selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik serta Peraturan-Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun tantangan yang perlu dijawab adalah semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan yang menuntut kebijakan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **3.2. Isu Strategis**

Melihat permasalahan di atas isu strategis yang perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam 20 tahun mendatang di Kabupaten Tapin yaitu :

1. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana;
2. Kelestarian sumber daya Alam dan lingkungan hidup;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Optimalisasi pengembangan sektor industri unggulan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
5. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
6. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan;
7. Kualitas pembangunan manusia dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli;
8. Besarnya aspirasi pengalaman nilai dan norma agama dalam berbagai dimensi kehidupan pada tatanan sosial;
9. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah;
10. Kualitas kehidupan berdemokrasi dan berpolitik;
11. Peran serta pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan masalah sosial;
12. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah;
13. Kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengairan dan sumberdaya air;
14. Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
15. Kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

16. Kualitas pelayanan publik;
17. Optimalisasi pendelegasian kewenangan ke Kecamatan;
18. Penguatan otonomi desa dan keberdayaan tatanan masyarakat.

## BAB IV

### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

#### 4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 hendak mewujudkan sebuah kondisi masa depan atau visi yang perwujudannya menjadi harapan bagi seluruh pihak terkait daerah. Rumusan visi tersebut, selain memperhatikan visi RPJP Nasional dan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, juga mengacu pada kondisi nyata dan isu strategis Kabupaten Tapin serta aspirasi berbagai unsur dari pihak masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha Kabupaten Tapin. Rumusan visi RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025 adalah:

#### **“ TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA “**

Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005 - 2025 :

“*Kabupaten Tapin yang Religius*” mengandung makna bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin.

“*Sejahtera*” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Rumusan visi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 memiliki relevansi dan berkontribusi kepada perwujudan visi RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yakni “*Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri*”. Visi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 juga relevan dan berkontribusi terhadap

pencapaian visi RPJP Nasional 2005-2025 yakni “*Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*”.

#### **4.2. Misi Pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025**

Substansi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 yakni “Tapin sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan” diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pihak masyarakat, pihak swasta maupun pihak pemerintah. Sejumlah upaya dimaksud dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut.

**(1) Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya**

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

**(2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing**

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

**(3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan**

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung sumber daya manusia yang handal

**(4) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan**

Misi ini mengandung upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan

Rantau Baru, Margasari Baru dan Binuang Baru yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa

**(5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)**

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat

Visi	Misi
<p><i>“Tapin yang Religius dan Sejahtera”</i></p>	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya
	Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia Tapin yang berdaya saing
	Misi 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan
	Misi 4: Mewujudkan ketersediaan infrastruktur di berbagai bidang dan kawasan
	Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance)

Rumusan misi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 memiliki relevansi dan berkontribusi terhadap misi RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 yakni: (1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, (2) Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, (3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, (4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, (5) Menciptakan taat asas dan tertib hukum.

Misi RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 juga memiliki relevansi dan keterkaitan dengan Rumusan misi RPJP Nasional 2005-2025 yaitu (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia menjadi

negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berdasarkan kepentingan nasional, (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Umum dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025

Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Tapin sebagai visi pembangunan 2005-2025 adalah “*Tapin yang Religius dan Sejahtera*”. Misi pembangunan untuk mewujudkan visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya; (2) Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing; (3) Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan; (4) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur diberbagai bidang dan kawasan; (5) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Agar misi pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kebijakan umum sebagai payung bagi arah kebijakan pembangunan secara sektoral, sub-wilayah, dan periodisasi lima tahunan pada RPJM Daerah selama periode 2005-2025. Adapun substansi kebijakan umum RPJP Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 adalah:

- (1) Peningkatan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya,
- (2) Peningkatan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing,
- (3) Peningkatan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan,
- (4) Peningkatan ketersediaan infrastruktur diberbagai bidang dan kawasan,
- (5) Peningkatan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Penjelasan substansi dan tujuan dari masing-masing kebijakan umum tersebut adalah sebagai berikut :

### **5.1.1. Peningkatan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya**

Agama adalah landasan paling utama dari kehidupan manusia, sehingga segala perilaku, tindakan dan aktivitas oleh seluruh unsur di Kabupaten Tapin dalam mewujudkan diri sebagai daerah maju di Kalimantan Selatan, idealnya bernafaskan keagamaan. Substansi kebijakan ini tidak hanya pada bagaimana penghayatan dan pengamalan ajaran agama, tetapi juga pada bagaimana termanifestasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan agama serta semakin berfungsinya nilai dan ajaran agama dalam manifestasi etos dan budaya kerja serta perilaku akhlak mulia dalam tatanan sosial. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) keterpenuhan sarana peribadahan yang ditandai oleh rasio tempat ibadah dengan penduduk yang semakin memadai; (2) meningkatnya jemaah masjid, jemaah haji, majelis ta'lim dan jumlah pembayar zakat; (3) meningkatnya penyelenggaraan pendidikan agama dan pengajian; (4) meningkatnya toleransi antar umat beragama; (5) meningkatnya manifestasi perilaku akhlak mulia dan kebajikan sosial dalam masyarakat.

### **5.1.2. Peningkatan Sumber Daya Tapin yang Berdaya Saing**

Peningkatan kualitas manusia merupakan muara dari pencapaian seluruh upaya pembangunan. Kualitas manusia menjadi prioritas utama karena terkait langsung dengan pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Tingginya kualitas manusia menunjukkan kinerja yang tinggi dari manfaat dan dampak pembangunan, tingginya kualitas manusia juga menunjukkan jaminan bagi keberlanjutan pencapaian pembangunan karena akan dikelola oleh pelaku pembangunan yang berkualitas.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah tercapainya IPM Kabupaten Tapin pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) angka melek huruf mencapai di atas 97 persen; (2) rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 12 tahun; (3) rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan; (4) angka harapan hidup diatas/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (5) angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan dan berada dibawah/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (6) rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan; (7) daya beli masyarakat minimal sama dengan/mendekati rata-rata daya beli masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.

### **5.1.3. Peningkatan Perekonomian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan**

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan menjadi prioritas kebijakan karena salah satu alasan keberadaan negara adalah mensejahterakan rakyat. Substansi kebijakan ini bukan hanya pada peningkatan tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan tersebut. Peningkatan kesejahteraan yang menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi tidak akan menjamin keberlanjutan pembangunan, karena itu upaya peningkatan kesejahteraan senantiasa dibarengi dengan upaya pemerataan.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tapin pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang

maju di Kalimantan Selatan. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) struktur perekonomian semakin bergeser dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor non pertanian baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; (2) pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan PDRB diatas/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (3) pendapatan perkapita/ nilai PDRB perkapita minimal sama dengan /mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (4) laju inflasi dibawah rata-rata laju inflasi Nasional; (5) indeks gini distribusi pendapatan minimal sama dengan/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (6) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari /mendekati rata-rata Kalimantan Selatan; (7) persentase penduduk bekerja/tidak menganggur di atas 90 persen dan angka partisipasi angkatan kerja semakin meningkat; (8) persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani di atas rata-rata Kalimantan Selatan/semakin meningkat; (9) kegiatan kepemudaan, olahraga dan seni-budaya semakin berkembang; (10) kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan manajemen pembangunan, serta perlindungan anak dan penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus membaik dan di atas rata-rata Kalimantan Selatan.

#### **5.1.4. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Diberbagai Bidang dan Kawasan**

Peningkatan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam merupakan keniscayaan bagi Kabupaten Tapin berhubung kondisi geomorfologi yang memiliki dimensi pegunungan dan dataran rendah secara sejajar mengapit kawasan budidaya, sehingga kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam akan berdampak buruk bagi kawasan budidaya tersebut. Selain itu, perubahan iklim global dan peristiwa bencana merupakan tantangan yang senantiasa harus direspons oleh setiap tatanan daerah. Substansi kebijakan ini terutama pada upaya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan Rencana Tata

Ruang wilayah (RTRW), pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, serta penanganan bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Tujuan dari kebijakan ini adalah terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan SDA Kabupaten Tapin secara sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) semakin optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW, terpeliharanya proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah yang ideal, rasio bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan perjumlah bangunan yang semakin meningkat, luas wilayah perkotaan yang semakin proporsional, luas wilayah industri/kawasan ekonomi khusus yang semakin proporsional, luas wilayah banjir yang semakin berkurang, luas wilayah kekeringan yang semakin berkurang; (2) Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kawasan rantau baru, margasari baru dan binuang baru; (3) semakin optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan yang ditandai oleh tingkat pencemaran yang terjaga pada ambang toleransi dan luas lahan kritis yang semakin berkurang atau minimal tidak bertambah; (4) tertanganinya dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan baik; (5) aksesibilitas daerah meningkat signifikan melalui keterpatuhan sarana-prasarana transportasi darat yang menjangkau seluruh desa/kelurahan, dilihat dari perbaikan dalam rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik, jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum; (6) berkembangnya fasilitas wilayah dilihat dari fasilitas perekonomian dan fasilitas publik berupa ketersediaan bank, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan perangkat telekomunikasi, ketersediaan restoran dan penginapan; (7) Iklim berinvestasi yang kondusif bagi penanaman modal dilihat dari kemudahan perijinan, regulasi investasi, pengenaan pajak daerah,

jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional baik penanaman modal dalam negeri maupun asing.

#### **5.1.5. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa**

Kapasitas pemerintahan dan pelayanan harus ditingkatkan terus karena dinamika lingkungan strategis menuntut adaptasi dan kreativitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan yang senantiasa berkualitas dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Kapasitas pemerintahan dan pelayanan sangat ditentukan oleh sistem, kelembagaan, SDM dan teknologi, sehingga substansi kebijakan ini mencakupi aspek-aspek tersebut.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah semakin terwujudnya pelayanan umum yang efektif-efisien dan memuaskan masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan pemerintahan. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) meningkatnya kapasitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis; (2) semakin efektif dan efisiennya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan menjangkau seluruh wilayah; (3) meningkatnya kinerja hasil layanan dan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha pada berbagai bidang layanan yang dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat; (4) semakin meningkatnya kualitas SDM pemerintah yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya; (5) meningkatnya Aparatur pemerintah daerah yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa; (6) meningkatnya penegakan dan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat.

## 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

### 5.2.1. Peningkatan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya

Pembangunan keagamaan diarahkan pada semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga termanifestasikan dalam tindakan dan perilaku yang mengkondisikan kebajikan pada berbagai bidang kehidupan dari seluruh unsur tatanan Kabupaten Tapin; melalui (1) peningkatan peran multipihak dalam pemenuhan kebutuhan sarana peribadahan, (2) pendidikan agama mulai dari pembelajaran Alquran anak usia dini hingga majelis pengajian, (3) pemeliharaan dan peningkatan toleransi kehidupan beragama, (4) penyadaran serta keteladanan etika kerja, etika bisnis dan etika sosial yang berlandaskan pada kebajikan yang bersumber dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

### 5.2.2. Peningkatan Sumber Daya Tapin yang Berdaya Saing

(1) Pembangunan pendidikan diarahkan pada (1) menurunnya angka buta huruf secara signifikan, (2) meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia SD, SLTP dan SLTA, (3) meningkatnya kecakapan hidup remaja/ pemuda putus sekolah, (4) meningkatnya kualitas guru, sarana-prasarana dan proses belajar-mengajar SD, SLTP dan SLTA; melalui (1) percepatan penghapusan buta huruf, (2) penuntasan wajib belajar bagi seluruh anak usia wajib belajar 12 tahun dan pencegahan putus sekolah, (3) pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat untuk kecakapan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan inovatif pemuda putus sekolah, dan (4) peningkatan kualitas guru, peningkatan kecukupan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, dan peningkatan pencapaian nilai dan kelulusan ujian nasional pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, dengan prioritas pada wilayah dengan angka buta huruf dan putus sekolah yang tinggi, serta

mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

- (2) Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana diarahkan pada
  - (1) termanifestasikannya pola hidup, lingkungan hidup dan perilaku hidup sehat masyarakat dengan mengutamakan pencegahan dari pengobatan, (2) meningkatnya efektivitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, (3) menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, (4) terkendalikannya pertumbuhan penduduk, (5) terpenuhinya kebutuhan peralatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis, (6) meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, flu-burung dan sejenisnya serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global; melalui
    - (1) promosi hidup sehat, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan perbaikan gizi khususnya pada masyarakat miskin, wilayah pegunungan dan wilayah kumuh, (2) peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis/ jaminan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada keluarga miskin disertai peningkatan kemampuan pelayanan dari institusi kesehatan beserta jaringannya, (3) peningkatan efektivitas peran sarana pelayanan kesehatan serta pemberdayaan posyandu dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, serta pemantauan pertumbuhan balita, (4) revitalisasi gerakan keluarga berencana dan pelebagaan norma keluarga kecil dan sejahtera, (5) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan, (6) pengembangan sistem antisipasi penyakit spesifik dan dampak kesehatan dari pemanasan global sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Tapin.
- (3) Penguatan daya beli masyarakat diarahkan untuk tersedianya alternatif pilihan masyarakat dalam mengakses barang/komoditas yang menjadi kebutuhan pokok dengan pendapatan yang layak dan harga yang terjangkau; melalui upaya penciptaan kondisi bagi

meningkatnya pendapatan masyarakat, regulasi yang menjamin suplai barang/komoditas kebutuhan pokok masyarakat, intervensi pasar atas komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, serta pengaturan yang ketat bagi berjalannya etika bisnis pengusaha kebutuhan pokok.

### **5.2.3. Peningkatan Perekonomian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan**

- (1) Pengembangan struktur perekonomian diarahkan untuk berlangsungnya transformasi struktur perekonomian sehingga menjelang tahun 2025 kontribusi sektor primer (pertanian secara umum) terus berkurang dan semakin berimbang dengan sektor sekunder (industri pengolahan hasil produk primer) dan tersier (jasa perdagangan dan keuangan serta informasi dan komunikasi) baik dalam nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; melalui perbaikan pada kegiatan agronomis kearah peningkatan produksi yang ramah lingkungan serta akselerasi pengembangan rantai nilai produk primer dalam kerangka agribisnis, agroindustri secara terpadu dan bersimbiosis dengan pengembangan sektor industri dan sektor jasa dengan berbasis pada interkoneksi desa-desa dengan ibu kota kecamatan.
- (2) Pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan diarahkan pada meningkatnya produksi dan produktivitas dengan rantai nilai yang menekankan kualitas dari segi ekologis/organik, rasa dan aroma, nilai tambah pengolahan hasil, serta efektivitas dan efisiensi usahatani dengan didukung oleh kemampuan teknis-agronomis dan kekuatan kelembagaan pada petani guna tercapainya pendapatan rumah tangga petani yang tinggi, perdagangan komoditas yang memantapkan sistem agribisnis dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; melalui (1) optimalisasi penggunaan lahan, penggunaan bibit bermutu yang adaptif terhadap perubahan iklim, inovasi pemupukan dan

pengendalian hama kearah praktek organik, perbaikan jaringan irigasi usahatani dan jaringan irigasi desa, pompanisasi dan pembangunan embung, peningkatan kualitas pengolahan hasil dan pengemasan, pengembangan jaringan pemasaran, serta pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani, (2) penjaminan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, perlindungan keamanan pangan dan fasilitasi kemandirian pangan tingkat desa/kelurahan, (3) pemberdayaan SDM dan kelembagaan penyuluhan; dalam kerangka untuk berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri yang efektif-efisien serta mendukung simbiosis desa-desa dengan ibukota kecamatan dalam suatu sistem konektifitas.

- (3) Pembangunan peternakan diarahkan pada (1) meningkatnya populasi ternak besar yang perkembangannya bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan dalam mewujudkan kesejahteraan peternak, kemajuan sistem agribisnis; melalui optimalisasi hasil inseminasi buatan dan kawin alami, penyediaan bibit dan pejantan yang memenuhi standar teknis serta berkelanjutan, fasilitasi pemantauan, pengawasan dan penanganan penyakit ternak, dukungan regulasi dan sumberdaya bagi pengembangan lahan penggembalaan, pembinaan teknologi, pengembangan kelembagaan yang mengakselerasi keterlibatan swasta, serta dukungan sarana/prasarana, (2) meningkatnya produksi ternak unggas dan kesejahteraan peternak unggas; melalui dukungan kelembagaan yang menjamin perkembangan inovasi dan relasi saling memberdayakan antar pelaku dalam agribisnis peternakan unggas.
- (4) Pembangunan perikanan diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan budi daya perikanan dalam dukungan peralatan dan perahu penangkapan yang memungkinkan jangkauan penangkapan yang lebih luas serta meningkatnya produksi budidaya tambak dengan senantiasa memperhatikan

keberlanjutan produksi secara ekologis; melalui (1) modernisasi teknologi penangkapan dan akses sarana penangkapan, (2) penguatan kelembagaan masyarakat budi daya ikan kearah pengembangan inovasi, (3) dukungan bagi inovasi berkelanjutan dalam budidaya tambak bagi ketersediaan bibit, teknologi budidaya, pola tebar, pengaturan ruang, serta pengendalian penyakit.

- (5) Pengembangan industri, usaha kecil, dan usaha menengah diarahkan pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja terkait posisinya sebagai sektor tujuan dalam transformasi perekonomian; melalui (1) pengembangan peluang dan dorongan realisasi investasi bagi pemilik modal dan pelaku usaha, (2) peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan kelembagaan pelaku usaha untuk menghasilkan produk unggul spesifik, (3) pengembangan jaringan pasar dengan orientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan sub-sub wilayah kearah agroindustri
- (6) Pemanfaatan potensi pertambangan diarahkan pada eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi dengan mempertimbangkan secara hati-hati konsistensi dengan RTRW Kabupaten Tapin dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, hubungannya dengan kelestarian ekologi dan sumberdaya alam, dan dampaknya pada komunitas lokal dimana potensi tersebut berada; melalui pelibatan peran serta investasi swasta dibawah kordinasi dan pengawasan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan kerentanan untuk miskin; melalui (1) intervensi langsung atau perlindungan sosial dalam pemenuhan hak-hak dasar pada level rumah tangga miskin, (2) pemberdayaan secara partisipatoris pada level

komunitas sebagai wadah bagi rumah tangga miskin dalam mengakses sumberdaya dan penciptaan pendapatan dalam mekanisme kolektivitas, (3) pengembangan usaha kecil dan menengah yang menempatkan rumah tangga miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat, serta (4) memastikan efek pertumbuhan ekonomi bagi penyerapan tenaga kerja dari rumah tangga miskin; dengan memperhatikan secara cermat karakteristik rumah tangga dan kespesifikan wilayah dari kemiskinan; dalam suatu kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin.

- (8) Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk semakin tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani mulai dari penampungan hingga pemberdayaan sesuai tingkat keparahan masalah kesejahteraan sosial yang disandang; melalui (1) penyediaan/dukungan sarana dan prasarana penanganan pada penampungan, (2) penyadaran, pembinaan, pengasuhan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta (3) mendorong kedermawanan sosial dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (9) Pembangunan pemuda, olah raga, seni-budaya dan kepariwisataan diarahkan pada berkembangnya kegiatan kepemudaan untuk pematangan kepribadian dan keluasan wawasan, kegiatan olah raga untuk prestasi maupun kesehatan, meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah serta teraktulisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli, berkembangnya destinasi dan even wisata; melalui (1) dukungan sarana/prasarana kepemudaan, olah raga dan kesenian serta pariwisata, (2) pembinaan kelompok/organisasi kepemudaan, olah raga dan kesenian, (3) pelaksanaan even dan kompetisi bagi pengembangan sportivitas dan prestasi; (4)

penyelenggaraan even pengenalan dan pelestarian karya budaya, situs budaya dan pengetahuan asli bagi pariwisata.

- (10) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan serta berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dengan tetap berlandaskan pada tata nilai dan norma yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat; melalui (1) pengarusutamaan gender dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan, (2) pengembangan sistem rekrutmen dan pencapaian karir pro-gender, (3) pembukaan ruang partisipasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang pro-gender, (4) pemihakan dan bantuan kepada perempuan kepala rumah tangga, (5) regulasi dan perlindungan bagi kekerasan terhadap anak.
- (11) Pembangunan koperasi diarahkan pada berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat dan menempatkannya sebagai soko-guru perekonomian yang mengandalkan kerjasama dan kolektivisme untuk bersinergi dengan lembaga perusahaan yang mengandalkan persaingan dan individualisme dalam perkembangan perekonomian daerah; melalui (1) pemantapan ideologi berkoperasi, (2) pemberdayaan SDM dan kelembagaan koperasi, (3) penguatan teknologi dan manajemen koperasi, (4) penguatan jaringan koperasi sebagai gerakan sosial mandiri khususnya pada komunitas petani, peternak, nelayan dan pelaku UKM.
- (12) Pengembangan iklim berinvestasi diarahkan pada berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing untuk perkembangan sektor-sektor perekonomian; melalui (1) keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, (2)

ketersediaan fasilitas dan sarana/prasarana, kemudahan perizinan investasi, dan regulasi yang memudahkan investasi.

#### **5.2.4. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Diberbagai Bidang dan Kawasan**

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana bagi aksesibilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan bagi angkutan dan perlintasan orang dan barang yang memenuhi tuntutan akselerasi kemajuan wilayah; melalui pengembangan moda transportasi darat dan sarananya yang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah serta dukungan bagi percepatan optimalisasi dan efektivitas.
- (2) Pengembangan fasilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya fasilitas yang bisa mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah; melalui dukungan dan fasilitasi bagi ketersediaan bank, ketersediaan energi dan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan telekomunikasi dan informatika, ketersediaan restoran dan hotel dengan prioritas pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, selanjutnya menjangkau desa-desa sesuai tingkat perkembangannya.
- (3) Pemanfaatan ruang diarahkan pada terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya, berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri, dan kawasan strategis yang proporsional dalam akselerasi kemajuan wilayah, serta tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan pada tingkat yang menjamin keselamatan masyarakat; melalui pemanfaatan ruang yang konsisten dan patuh pada arahan RTRW serta terakselerasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan daerah.

#### **5.2.5. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)**

- (1) Perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan diarahkan pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan dengan dukungan sistem administrasi dan keuangan yang memenuhi kaidah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; melalui (1) dukungan legislasi dan regulasi yang memberi kerangka legal, (2) peningkatan kapabilitas SDM secara kontinyu sesuai tuntutan profesionalisme, (3) pemberlakuan sistem dan prosedur secara kontinyu sesuai tuntutan kebutuhan, dan (4) pemberian teladan dan kepemimpinan.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan umum diarahkan pada berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan konsumen; melalui (1) pengembangan sistem pelayanan terpadu, (2) optimalisasi dalam aplikasi teknologi informasi elektronika dalam pelayanan, dan (3) penerapan standar operasional dalam penyelenggaraan pelayanan prima.
- (3) Pengembangan SDM pemerintah diarahkan untuk meningkatnya kapasitas secara kontinyu dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan guna mengakselerasi pencapaian kinerja pada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan dinamika lingkungan strategis; melalui (1) pengkondisian organisasi pembelajar, (2) peningkatan jenjang pendidikan formal, serta (3) pendidikan dan pelatihan yang menunjang langsung pada perwujudan kompetensi.
- (4) Pengembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah diarahkan pada tercapainya kapasitas yang senantiasa bersesuaian dengan tuntutan perwujudan pemerintahan yang baik dan relasi saling memberdayakan dengan kelembagaan

masyarakat dan kelembagaan swasta; melalui (1) penataan struktur organisasi yang fungsional, (2) peneladanan kepemimpinan, (3) penanaman nilai dan norma profesionalisme, (4) perwujudan tatakelola yang memanifestasikan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta (5) pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (5) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta kepatuhan pada hukum diarahkan pada semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum sehingga angka kriminalitas terus berkurang, pertentangan dan konflik terjaga pada tingkat yang tetap memelihara kohesi sosial, serta Kabupaten Tapin senantiasa tercitrakan sebagai daerah yang aman dan damai; melalui (1) penyadaran hukum dan keamanan, (2) mendorong masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara swadaya, (3) peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta peranan satuan polisi pamong praja dan aparat penegak hukum lainnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan kejadian-kejadian konflik dan gangguan ketertiban/keamanan.

### **5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan 2005-2025**

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin membutuhkan tahapan yang saling berkelanjutan dalam mewujudkan visinya pada tahun 2025. Tahapan dan prioritas tersebut disatu sisi mencerminkan adanya permasalahan pembangunan yang diselesaikan secara berkelanjutan berdasarkan pencapaian dari periode ke periode pembangunan, disisi lain juga mencerminkan adanya permasalahan pembangunan spesifik yang dipecahkan pada setiap periode. Namun keduanya saling terkait utuh dan berkesinambungan untuk perwujudan visi pembangunan Kabupaten Tapin 2025 dan berkontribusi atas pencapaian visi pembangunan jangka panjang

Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2025. Tahapan dan prioritas pembangunan berdasarkan periode RPJM Daerah adalah sebagai berikut.

### **1. RPJM Daerah Pertama (2005-2009)**

Tahapan pertama RPJM Daerah Kabupaten Tapin terutama berfokus pada penataan kelembagaan pemerintah guna meletakkan landasan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pelayanan yang memuaskan, serta perwujudan daya saing perekonomian sebagai landasan bagi akselerasi pertumbuhan. Pemantapan kelembagaan pemerintahan dan peletakan dasar bagi daya saing perekonomian ini sangat urgen dalam fase awal penyelenggaraan otonomi daerah.

Pada tahap ini peningkatan kualitas SDM masyarakat dari segi pendidikan dan kesehatan diletakkan dasar-dasarnya. Begitu pula pembangunan sarana-prasarana terutama kondisi infrastruktur sebagai dasar bagi daya saing perekonomian daerah, penataan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta perbaikan sistem pelayanan publik, menjadi perhatian pokok.

Pada akhir tahap ini, IPM Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai nilai sekitar 76 dengan indikator bidang pendidikan tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun, bidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 64 tahun dan turunnya angka kematian ibu dan anak.

Dari segi kesejahteraan, pada akhir tahap ini struktur perekonomian Kabupaten Tapin diharapkan semakin bergeser dari dominasi pertanian ke sektor non pertanian. Kontribusi sektor pertanian diproyeksikan dibawah 48,39 persen sektor manufaktur di atas 16,66 persen dan sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 15 persen. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian diproyeksikan dibawah 50 persen, sementara sektor manufaktur dan jasa-jasa diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 50 persen angkatan kerja. Nilai PDRB diproyeksikan sekitar Rp. 1.163.522.710.000, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 13,91 persen, PDRB perkapita berdasarkan harga

berlaku sekitar Rp. 7.528.940. Pada tahap ini, produksi pertanian, peternakan, perikanan diproyeksikan meningkat terus serta ketahanan pangan terjaga dengan baik dan penduduk miskin berkurang.

Dari segi daya saing daerah, pada tahap ini diharapkan tersedianya infrastruktur perhubungan diberbagai bidang dan kawasan dengan jaringan yang terintegrasi satu sama lain khususnya jalan, terminal, jembatan, sistem inter dan antar moda di Kabupaten Tapin, sementara jalan yang menghubungkan antar desa dengan kecamatan dan ibu kota Kabupaten semakin memungkinkan angkutan orang dan barang berlangsung lancar. RTRW diproyeksikan telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam penataan ruang wilayah, sementara itu terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan rantau baru dan pengaturan tata ruang yang baik

Selain itu, kebersamaan masyarakat diproyeksikan berada dalam kondisi terpelihara, ditandai dengan ketertiban dan keamanan yang terjaga dan tidak adanya konflik serta sinergisnya potensi daerah dalam mendukung kemajuan daerah. Revitalisasi nilai budaya dan penggalian pengetahuan lokal yang juga mendukung pariwisata diproyeksikan berlangsung signifikan pada tahap ini.

Kehidupan keagamaan pada periode tahun 2005-2009 ini diproyeksikan berjalan dengan baik, ditandai oleh penghayatan dan pengamalan agama khususnya agama Islam yang tidak hanya termanifestasikan dalam ritual ibadah tetapi juga menjelma sebagai landasan perilaku dan tindakan sosial masyarakat. Toleransi beragama diharapkan semakin terjaga dan sarana beribadah tercukupi.

## **2. RPJM Daerah Kedua (2010-2014)**

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari pencapaian pembangunan pada RPJM Daerah Pertama. Beberapa prioritas baru menjadi fokus pembangunan, sambil mengakselerasi pencapaian dari periode RPJM Daerah sebelumnya.

Pembangunan pada periode ini terutama berfokus pada akselerasi pengembangan sumberdaya manusia yang meliputi pemberantasan buta-huruf dituntaskan, angka putus sekolah ditekan, kualitas guru dan proses belajar-mengajar diperbaiki, pendidikan tinggi dikembangkan; pengembangan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan yang bertumpu di desa, dan pengembangan infrastruktur wilayah. Pada periode ini didorong juga upaya-upaya untuk membangun tatanan taat azas yang patuh pada norma dan ketentuan agama, hukum dan adat-istiadat. Penanggulangan kemiskinan pada periode ini diberi perhatian khusus mengingat tahun 2015 merupakan akhir periode MDGs yang indikator utamanya adalah penurunan angka kemiskinan.

Pembangunan agribisnis pada periode ini difokuskan pada terbangunnya desa-desa sebagai basis peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, dengan inovasi yang mendorong nilai tambah pada kualitas produksi secara agronomis. Agribisnis yang bertumpu di desa ini terhubung dengan ibu kota kecamatan melalui sarana/prasarana transportasi untuk akses ke jalan provinsi serta akses sarana produksi dan berbagai fasilitas.

Pada tahap ini, IPM Kabupaten Tapin diproyeksikan mencapai nilai sekitar 76,50 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan membaiknya sarana dan prasarana pendidikan, dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 66 tahun dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari segi kesejahteraan, pada akhir tahap ini kontribusi sektor pertanian dalam nilai PDRB berdasarkan harga berlaku diproyeksikan dibawah 8,35 persen, sementara kontribusi sektor manufaktur diharapkan diatas 12 persen dan sektor jasa-jasa diatas 10 persen. Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB diproyeksikan sekitar Rp. 2.193.617.348.000 dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut 0,08 persen per tahun, sementara itu pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai diatas rata-rata 4,48 persen, PDRB perkapita diharapkan

diatas Rp. 6.833.630 dengan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita pada periode tersebut sekitar 2,85 persen. Angka kemiskinan diharapkan tertekan hingga dibawah 5 persen dan angka pengangguran dibawah 8 persen.

Daya saing daerah pada tahap ini diproyeksikan semakin meningkat dengan terakselerasinya fungsi sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan dalam kondisi baik 55 persen, terminal lokal 75 persen serta terbentuknya sistem transportasi yang terpadu untuk mendukung percepatan ekonomi. Pada periode ini fasilitas wilayah seperti hotel/penginapan, restoran, dan komunikasi-informasi berkembang pesat, dan tata ruang wilayah dipatuhi sebagai acuan dalam penggunaan ruang. Pada tahapan ini pula terbangun dan terpeliharanya kawasan rantau baru dan perencanaan pengembangan kawasan margasari baru, kemajuan pada daya saing daerah ini diharapkan juga dikontribusi oleh pencapaian sistem pelayanan yang memuaskan khususnya dalam perizinan investasi dan implementasi Perda yang mendukung investasi.

Kebersamaan antar unsur tatanan sosial pada periode ini diekspektasi semakin meningkat sebagai hasil dari kegiatan yang mendorong kepatuhan kepada norma hukum dan adat-istiadat serta apresiasi atas kearifan lokal. Keberdayaan masyarakat melalui kelompok dan organisasinya serta partisipasi substantif dalam pembangunan, juga diproyeksikan meningkat sebagai hasil dari bertumpunya pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan di desa, sehingga desa menjelmakan teknostruktur yang kuat.

Pengamalan ajaran agama pada periode 2010-2014 ini diproyeksikan semakin substansial seiring dengan semaraknya pendidikan agama pada anak usia dini dan keluarga, bertambahnya sarana/prasarana peribadahan, dijadikannya agama sebagai sumber motivasi dan etos dalam bekerja dan manifestasi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

diproyeksi lebih tinggi, guru dan tempat belajar mengaji bagi anak usia dini meningkat, kelompok majelis taklim meningkat, jemaah mesjid meningkat, penyelenggaraan haji terkelola semakin baik, toleransi dan perilaku akhlak mulia mewarnai tatanan sosial.

### **3. RPJM Daerah Ketiga (2015-2019)**

Pada periode ini, momentum perubahan yang telah diakselerasi pada periode kedua dimanfaatkan untuk memantapkan pencapaian dalam kualitas manusia, namun prioritas-prioritas baru dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah serta landasan kebersamaan dan nafas keagamaan juga ditangani sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis.

Fokus pembangunan pada tahap ini adalah memantapkan pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia, dimana hasil dari pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak hanya diarahkan bagi lahirnya SDM berkualitas guna mendukung kemajuan daerah, tetapi mulai bergeser pada makna lahirnya manusia berkualitas yang memiliki pilihan luas dalam kehidupannya. Peningkatan kualitas manusia pada periode ini diharapkan berjalan seiring dengan praktek demokrasi yang semakin substantif.

Fokus lainnya adalah pemantapan sistem agribisnis yang menghubungkan perkembangan ibukota kecamatan dengan desa-desa sekitarnya kearah terpenuhinya unsur-unsur sebagai kawasan agropolitan. Interkoneksi antara kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada desa-desa dengan ibukota kecamatan sebagai terminal pemasaran hasil agribisnis dan pusat fasilitas serta sarana produksi bagi agribisnis, dan dimantapkan melalui dukungan infrastruktur wilayah dalam hal transportasi, komunikasi dan informasi, ketersediaan listrik dan air bersih serta mendorong kemajuan dalam inovasi teknologi baik budidaya maupun pengolahan hasil. Pada tahapan ini pula terbangun dan terpeliharanya kawasan rantau baru, terbangunnya kawasan margasari

baru dan proses pengembangan pembangunan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin

Pencapaian kualitas manusia pada tahap ini direncanakan mencapai nilai IPM sekitar 77 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan sedangkan untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 68 tahun dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan

Pada periode ini kontribusi sektor primer pertanian terhadap struktur perekonomian diproyeksikan dibawah 10,55 persen, sementara sektor manufaktur meningkat hingga diatas 12,99 persen dan sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 21,70 persen. Pergeseran ini diharapkan diikuti pula oleh pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor pertanian diharapkan menampung dibawah 40 persen dan dua gabungan sektor lainnya diatas 60 persen. Nilai PDRB ADHB pada akhir tahap ini diproyeksi diatas Rp. 7.549.606.309.000 dengan pertumbuhan rata-rata 13,49 persen, nilai PDRB perkapita diatas Rp.7.932.340 dengan rata-rata pertumbuhan 2,03 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 4,66 persen. Angka kemiskinan diharapkan dipertahankan dibawah 5 persen dan angka pengangguran dibawah 6 persen.

Pelayanan umum pada periode ini ditargetkan semakin prima membenahi administrasi kependudukan ditandai rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk semakin tinggi. Selain itu pendidikan gratis diharapkan semakin efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah orang miskin, begitu pula layanan kesehatan gratis diharapkan efektif menjangkau perawatan orang miskin. Terkait dengan daya saing daerah, pelayanan investasi diharapkan terakselerasi khususnya dengan pemanfaatan potensi pertambangan.

Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan pada periode ini diharapkan telah mewujudkan modal sosial yang kuat bagi terwujudnya Kabupaten Tapin yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. Modal sosial tersebut ditandai oleh tingginya saling-percaya, kerjasama timbal-balik dan kepatuhan kepada norma diantara kelompok, golongan dan lapisan dalam masyarakat, dunia pemerintah dan dunia usaha disertai dengan sinergitas diantara ketiga pihak secara transparan, berakuntabilitas dan saling memberdayakan.

Berbagai pencapaian tersebut diharapkan tetap bernafaskan keagamaan. Pada periode ini pencapaian dalam keterpenuhan sarana peribadahan, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, manifestasi ajaran agama sebagai etos kerja, serta manifestasi ajaran agama dalam perilaku akhlak mulia, secara kualitatif diharapkan semakin meningkat dibanding periode RPJM Daerah sebelumnya.

#### **4. RPJM Daerah Keempat (2020-2025)**

Ini adalah periode terakhir pembangunan jangka panjang 20 tahun Kabupaten Tapin. Periode ini merupakan momentum untuk pencapaian kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial. Periode ini juga merupakan peletakan dasar sekaligus transisi untuk memasuki periode pembangunan jangka panjang berikutnya.

Pada periode ini peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga periode RPJM Daerah sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarakan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk pemanusiaan manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar melahirkannya sebagai sumberdaya handal untuk perekonomian, perpolitikan atau sosial budaya, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Pada periode 2020-

2025 ini, tatanan dengan manusia berkualitas secara individual, diharapkan didukung penuh oleh landasan kebersamaan dan nafas keagamaan pada tingkat struktur sosial, sehingga kesejahteraan mewujudkan sebagai bagian dari kemanusiaan dan dalam tatanan sosial yang baik.

Program pembangunan dalam perekonomian yang sebelumnya difokuskan pada akselerasi agribisnis, pada periode ini difokuskan pada terbentuknya kawasan agropolitan. Program diarahkan untuk mensinergikan desa-desa agribisnis dengan ibukota kecamatan sehingga interkoneksi keduanya melahirkan kawasan agropolitan. Karakteristik program pada periode ini adalah pengkondisian peradaban kota ditengah lingkungan pertanian pada ibukota-ibukota kecamatan dimana ibukota kabupaten merupakan sentrum dari peradaban tersebut. Hal ini didukung dengan program-program yang mendorong kemajuan masyarakat dalam bentuk olahraga dan kepemudaan, apresiasi seni-budaya, apresiasi pengetahuan/intelektualitas. Program pembangunan dalam pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai titik maksimal. Program peningkatan kualitas SDM pemerintah diarahkan pada terwujudnya pelayan masyarakat yang memadukan teknokratisme dengan humanisme. Program penguatan kelembagaan pemerintah diarahkan pada terposisikannya birokrasi dari Kabupaten hingga desa dan kelurahan sebagai teladan manifestasi akuntabilitas dan transparansi serta membangun kebersamaan dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan dunia usaha dalam mengusung kemajuan agropolitan bagi kemajuan Kabupaten Tapin.

Program pembangunan dalam daya saing daerah diarahkan pada terciptanya kualitas lingkungan hidup yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai guncangan ekologis khususnya dampak pemanasan global. Keterpeliharaan ruang terbuka hijau serta keseimbangan proporsi kawasan budidaya dengan kawasan lindung, ditata melalui implementasi program yang tetap konsisten dan patuh

pada arahan RTRW. Dalam hal sarana dan prasarana transportasi darat, pelabuhan, perhubungan, komunikasi-informasi serta kelistrikan dan energi, program-program pada tahapan ini lebih bersifat pemeliharaan.

Program yang terkait dengan landasan kebersamaan difokuskan pada signifikansi upaya revitalisasi, reaktualisasi dan manifestasi kearifan lokal, tata nilai dan norma serta adat-istiadat setempat dalam menjadikan potensi pariwisata sekaligus bagian dari upaya merespons secara kreatif unsur budaya yang datang dari luar akibat keterbukaan informasi dan komunikasi. Bersamaan dengan itu interkoneksi internal antar unsur tatanan Kabupaten Tapin dan interkoneksi eksternalnya pada level provinsi dan nasional diupayakan semakin intensif dan meluas guna menunjang keberadaan dari jalinan titik-titik agropolitan.

Program terkait dengan keagamaan difokuskan pada pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatikan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum. Manifestasinya adalah berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin.

Pencapaian IPM pada periode 2020-2025 diproyeksikan sekitar 79 dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dengan meningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pada indikator pendidikan lain yakni rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid, prestasi ujian nasional dan persentase tamatan perguruan tinggi terhadap total penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. dan untuk indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan tingkat pertumbuhan penduduk diharapkan terus menurun dan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan rasio posyandu

per satuan balita, rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian kesejahteraan pada periode 2020-2025 ditandai oleh struktur perekonomian dimana diharapkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dibawah 10,72 persen, manufaktur diatas 12,19 persen dan keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 24,28 persen; nilai PDRB ADHB sekitar Rp. 14.764.180.006.000 dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut sekitar 14,36 persen; nilai PDRB perkapita ADHK diproyeksikan diatas Rp.9.365.050, dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut diatas 3,38 persen; dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,48 persen.

Pencapaian dalam pelayanan pada periode tersebut ditargetkan menyajikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perizinan memenuhi standar pelayanan prima. SDM dan kelembagaan pemerintah pada periode ini diproyeksikan berada dalam kinerja optimum dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pencapaian dalam daya saing daerah diproyeksikan pada tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW, dimana proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya terpelihara keseimbangan proporsionalnya, serta kawasan perkotaan, kawasan industri, serta kawasan rawan banjir dan rawan kekeringan terkelola dengan baik. Pada tahap ini, infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanfaatannya dalam mendorong daya saing wilayah, dimana sarana/prasarana transportasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, serta energi dan ketenagalistrikan optimal mendukung fungsi-fungsi bagi kemandirian wilayah. Pada tahapan ini pula Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis yaitu kawasan rantau baru, kawasan margasari

baru dan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin

Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan daerah diproyeksikan mewujudkan modal sosial yang tinggi bagi lancarnya upaya pembangunan. Adat-istiadat, tata nilai dan norma setempat serta kearifan-kearifan lokal, diprediksikan teraktualisasikan dengan baik dalam berperan sebagai acuan kehidupan secara umum.

Pencapaian dalam hal keagamaan pada fase ini diproyeksikan mewujudkan rasio sarana peribadahan per satuan penduduk yang tinggi, pengamalan agama semakin efektif dalam berfungsi mewujudkan etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum.

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 ini merupakan arahan sosial dalam pencapaian visi bersama secara jangka panjang. Sebagai arahan sosial, RPJP Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat seluruh pihak terkait dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk berkontribusi secara kordinatif, partisipatif, efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJP Daerah Kabupaten Tapin memayungi semua perencanaan pembangunan daerah ini selama periode 2005-2025. Dokumen perencanaan inilah yang mengikat setiap periode perencanaan lima tahunan agar berjalan secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Tapin dan berkontribusi pada perwujudan visi jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Agar RPJP Daerah ini dapat efektif memberi arahan bagi perubahan jangka panjang daerah maka diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Pertama, Bupati Kabupaten Tapin yang bertugas selama periode 2005-2025, berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjadikan RPJP Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah pada periode masa jabatannya, serta menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada periode RPJM Daerah masa jabatannya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang digariskan dalam RPJP Daerah ini untuk periode RPJM Daerah tersebut.

Bupati Kabupaten Tapin juga berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi tentang konsistensi upaya dan pencapaian pembangunan pada periode RPJM Daerah masa jabatannya dengan tujuan dan arah kebijakan bagi periode RPJM Daerah yang digariskan pada RPJP Daerah ini. Selain itu, Bupati Kabupaten Tapin harus melihat keberlanjutan pembangunan antara periode RPJM

Daerah dengan periode RPJM Daerah sebelumnya dan periode RPJM Daerah berikutnya.

Kedua, DPRD Kabupaten Tapin berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya dalam penjabaran RPJM Daerah setiap periode maupun dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, DPRD juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi RPJP Daerah ini dengan penjabarannya dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta konsistensi antar periode RPJM Daerah.

Ketiga, Bupati dan DPRD Kabupaten Tapin berkewajiban mensosialisasikan visi dan misi serta tujuan/target dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Daerah ini kepada seluruh pihak terkait dari pihak masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha pada seluruh unit wilayah dan seluruh golongan/lapisan dalam tatanan Kabupaten Tapin. Dengan itu, visi dan misi serta arah kebijakan dalam RPJP Daerah ini betul-betul menjadi acuan bagi perencanaan top-down dan teknokratis pada dunia pemerintah maupun bagi perencanaan bottom-up dan partisipatoris oleh organisasi non pemerintah.

Keempat, seluruh pihak terkait di Kabupaten Tapin yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan pemuda, dunia pendidikan tinggi, LSM dan masyarakat secara umum, masyarakat dari berbagai pekerjaan dan profesi, serta pelaku usaha, ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi pada perencanaan, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, terkait dengan posisi RPJP Daerah ini sebagai arahan menyeluruh dan bersifat jangka panjang dari tujuan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJP Daerah ini merupakan arahan tentang kondisi apa yang akan diwujudkan dalam 20 tahun ke depan dan bagaimana arah kebijakan umum untuk mencapai kondisi tersebut.

Sebagai sebuah arahan sosial, RPJP Daerah ini diharapkan berfungsi mendorong partisipasi dan kontribusi dari semua pihak terkait Kabupaten Tapin, demi terwujudnya Kabupaten Tapin sebagai daerah yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam makna yang maju tersebut, terkandung substansi kualitas manusia, kesejahteraan, kemandirian daerah, kelestarian lingkungan dan pelayanan berkualitas lalu dilandasi dengan kebersamaan dan dinafasi oleh keagamaan, yang diharapkan menjadi “medan magnet” untuk menarik dan mengikat seluruh pihak terkait Kabupaten Tapin dalam saling berkontribusi pada pembangunan.

Diharapkan bahwa keberadaan RPJP Daerah ini dapat dipahami dengan baik oleh pihak terkait dari dunia pemerintah dan mensosialisasikannya kepada pihak terkait non pemerintah, dan dengan itu “medan magnet” dari visi RPJP Daerah ini dapat menarik semua kelompok, golongan, lapisan dan pihak terkait untuk bersatu padu dalam pembangunan Kabupaten Tapin dan berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional Indonesia.

Tabel Lampiran 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
Tapin yang Religius dan Sejahtera	Mewujudkan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya	Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan agama serta semakin berfungsinya nilai dan ajaran agama dalam manifestasi etos dan budaya kerja serta perilaku akhlak mulia dalam tatanan sosial	<u>Tahap I (2005-2009)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghayatan dan pengamalan ajaran agama khususnya agama islam yang tidak hanya termanifestasikan dalam ritual ibadah tetapi juga menjelma sebagai landasan perilaku dan tindakan sosial masyarakat</li> <li>• Toleransi beragama diharapkan semakin terjaga dan sarana beribadah tercukupi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran multi pihak dalam pemenuhan kebutuhan sarana peribadahan</li> <li>• Pendidikan agama mulai dari pembelajaran alquran anak usia dini hingga majelis ta'lim dan pengajian</li> <li>• Pemeliharaan dan peningkatan toleransi kehidupan beragama</li> <li>• Penyadaran serta keteladanan etika kerja, etika bisnis dan etika sosial yang berlandaskan pada kebijakan yang bersumber dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama</li> </ul>
			<u>Tahap II (2010-2014)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semaraknya pendidikan anak usia dini dan agama</li> <li>• Rasio tempat ibadah persatuan penduduk meningkat</li> <li>• Guru dan tempat belajar mengaji bagi anak usia dini meningkat</li> <li>• Kelompok majelis taklim meningkat</li> <li>• Jemaah masjid meningkat</li> <li>• Penyelenggaraan haji terkelola semakin baik</li> </ul>	

Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<p><u>Tahap III (2015-2019)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian dalam keterpenuhan sarana peribadahan, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, manifestasi ajaran agama sebagai etos kerja serta manifestasi ajaran agama dalam perilaku akhlak mulia semakin meningkat</li> </ul>	
			<p><u>Tahap IV (2020-2025)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatrikan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum</li> <li>• Berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin</li> </ul>	
	Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing	Peningkatan kualitas manusia merupakan muara dari pencapaian seluruh upaya pembangunan, kualitas manusia menjadi prioritas utama karena terkait langsung dengan pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan	<p><u>Tahap I (2005-2009)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM dari segi pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur</li> <li>• Penataan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pendidikan</li> <li>• Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana</li> <li>• Penguatan daya beli masyarakat</li> </ul>

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan sistem pelayanan publik</li> <li>• IPM 76</li> <li>• Wajar 9 tahun</li> <li>• Usia Harapan Hidup 64 tahun</li> <li>• Turunnya angka kematian Ibu dan Anak</li> </ul>	
			<p><u>Tahap II (2010-2014)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberantasan buta-huruf dituntaskan</li> <li>• Angka putus sekolah ditekan</li> <li>• Kualitas guru dan proses belajar mengajar diperbaiki</li> <li>• Pengembangan pendidikan tinggi</li> <li>• IPM 76,50</li> <li>• Wajar 12 tahun</li> <li>• Usia Harapan Hidup 66 tahun</li> </ul>	
			<p><u>Tahap III (2015-2019)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM 77</li> <li>• Wajar 12 tahun</li> <li>• Usia Harapan Hidup 68 tahun</li> </ul>	

Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<u>Tahap IV (2020-2025)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>• Kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk pemanusiaan manusia itu sendiri</li> </ul>	
	Mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	<u>Tahap I (2005-2010)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 48,39 %</li> <li>• Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB 16,66 %</li> <li>• Kontribusi sektor keuangan, persewaan &amp; jasa terhadap PDRB 15 %</li> <li>• Penyerapan TK sektor pertanian 50 %</li> <li>• Penyerapan TK sektor manufaktur dan jasa 43 %</li> <li>• PDRB ADHB Rp 1.163.552 (juta)</li> <li>• PDRB perkapita ADHB Rp 7.528.940</li> </ul> <u>Tahap II (2011-2015)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target MDG's</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan struktur perekonomian</li> <li>• Pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan</li> <li>• Pembangunan peternakan</li> <li>• Pembangunan perikanan</li> <li>• Pengembangan industri, usaha kecil dan usaha menengah</li> <li>• Pemanfaatan potensi pertambangan</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan</li> <li>• Pembangunan kesejahteraan sosial</li> <li>• Pembangunan pemuda, olahraga, seni-budaya dan kepariwisataan</li> </ul>

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan agribisnis difokuskan pada terbangunnya desa-desa sebagai basis peningkatan produksi pertanian dalam arti luas</li> <li>• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 8,35%</li> <li>• Kontribusi Sektor manufaktur terhadap PDRB 12%</li> <li>• Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB 10 %</li> <li>• PDRB ADHB Rp 2.193.617 (juta)</li> <li>• LPE 4,48%</li> <li>• PDRB perkapita Rp 6.833.630</li> <li>• Angka pengangguran 7%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Pembangunan koperasi</li> <li>• Pengembangan iklim berinvestasi</li> </ul>
			<p><u>Tahap III (2016-2020)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan sistem agribisnis yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan desa-desa sekitarnya kearah terpenuhinya unsur-unsur sebagai kawasan agropolitan</li> <li>• Interkonektifitas antara kegiatan produksi pertanian dalam arti luas dengan ibu kota kecamatan sebagai</li> </ul>	

Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			terminal pemasaran hasil agribisnis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 10 %</li> <li>• Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB 12 %</li> <li>• Sektor keuangan, persewaan &amp; jasa 21%</li> <li>• Penyerapan TK sektor pertanian 40 %</li> <li>• Penyerapan TK sektor lainnya 60 %</li> <li>• PDRB ADHB Rp 7.549.606 (juta)</li> <li>• PDRB Perkapita Rp 7.932.340</li> <li>• LPE 4,66 %</li> <li>• Kemiskinan 5 %</li> <li>• Pengangguran 6 %</li> </ul>	
			<u>Tahap IV (2020-2025)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya kawasan Agropolitan</li> <li>• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 10 %</li> <li>• Kontibusi sektor manufaktur terhadap PDRB 12 %</li> <li>• Kontribusi sektor Keu, sewa dan jasa terhdapa PDRB 24 %</li> <li>• PDRB ADHB Rp 14.764.180 (juta)</li> </ul>	

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB ADHK Rp 9.365.050</li> <li>• LPE 4,48 %</li> </ul>	
	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur	Peningkatan pengembangan wilayah dan tata ruang yang disertai kelestarian lingkungan dan sumber daya alam,	<p><u>Tahap I (2005-2025)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan</li> <li>• Penetapan Perda RTRW</li> <li>• Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana Rantau Baru</li> </ul> <p><u>Tahap II (2010-2014)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur fasilitas wilayah</li> <li>• Tata ruang wilayah dipatuhi sebagai acuan dalam penggunaan ruang</li> <li>• Perencanaan pengembangan kawasan margasari baru</li> </ul> <p><u>Tahap III (2015-2019)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur fasilitas wilayah (transfortasi, komunikasi dan informasi, listrikl dan air bersih)</li> <li>• Terbangun kawasan margasari baru</li> <li>• Pengembangan kawasan binuang baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>• Pengembangan fasilitas wilayah</li> <li>• Pemanfaatan ruang</li> </ul>

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			<u>Tahap IV (2020-2025)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW</li> <li>• Infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanfaatan</li> <li>• Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis (rantau baru, margasari baru, binuang baru)</li> </ul>	
	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance)	Terwujudnya pelayanan umum yang efektif - efisien dan memuaskan masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah	<u>Tahap I (2005-2009)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kelembagaan pemerintah</li> <li>• Peningkatan SDM</li> <li>• Perbaikan sistem pelayanan publik</li> </ul> <u>Tahap II (2010-2014)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pelayanan yang memuaskan</li> <li>• Pelayanan perizinan investasi yang baik</li> <li>• Implementasi perda yang mendukung investasi</li> </ul> <u>Tahap III (2015-2019)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia</li> <li>• Pelayanan prima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan (perencanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan)</li> <li>• Sistem administasi dan keuangan yang memenuhi kaidah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi</li> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan umum</li> <li>• Pengembangan SDM (pemerintah)</li> <li>• Pengembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah</li> <li>• Pemeliharaan ketertiban dan keamanan</li> </ul>

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

Visi	Misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
			Tahap IV ( 2020-2025) • Tingkat kepuasan masyarakat tinggi • Standar pelayanan prima (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan administrasi perizinan) • SDM dan kelembagaan pemerintah dalam kinerja optimum	

Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja

No.	Visi	Misi	Sasaran pokok	Indikator dan target
1	Tapin Religius dan Sejahtera	Mewujudkan masyarakat tapin yang religius, berakhlak dan berbudaya	Peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterpenuhan sarana peribadahan yang di tandai oleh rasio tempat ibadah dengan penduduk yang semakin memadai</li> <li>Meningkatnya jemaah masjid, majelis ta'lim, jemaah haji</li> <li>Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan agama dan pengkajian</li> <li>Meningkatnya toleransi antar umat beragama</li> <li>Meningkatnya manifestasi perilaku akhlak mulia dan kebajikan sosial dalam masyarakat</li> </ul>
2		Mewujudkan sumber daya manusia tapin yang berdaya saing	Peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka melek huruf mencapai di atas 97 %</li> <li>Rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 12 tahun</li> <li>Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru, dan murid berada pada posisi sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di Kalimantan Selatan</li> <li>AHH di atas/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>AKB,AKI melahirkan terus mengalami penurunan dan berada di bawah/mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>Rasio Posyandu/satuan balita, rasio puskesmas/pustu per satuan penduduk, Rasio rumah sakit/satuan penduduk, rasio dokter/ satuan penduduk, rasio tenaga medis/ satuan penduduk berada sejajar dengan kabupaten/kota yang maju di Kalimantan Selatan</li> <li>DBM minimal sama dengan/mendekati rata-rata DBM masyarakat propinsi Kalsel</li> </ul>
3		Mewujudkan Perekononian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan	Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh SDA yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung SDM yang handal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur Perekonomian semakin bergeser dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor non pertanian baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja</li> </ul>

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

No.	Visi	Misi	Sasaran pokok	Indikator dan target
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan PDRB di atas/ mendekati rata-rata propinsi Kalimantan Selatan</li> <li>• Pendapatan perkapita /nilai PDRB perkapita minimal sama dengan/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>• Laju Inflasi di bawah rata-rata laju inflasi Nasional</li> <li>• Indeks gini distribusi pendapatan minimal sama dengan/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>• Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari/ mendekati rata-rata Kalimantan Selatan</li> <li>• Persentase penduduk bekerja/ tidak menganggur di atas 90 % dan angka partisipasi kerja semakin meningkat</li> <li>• Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani di atas rata-rata Kalimantan Selatan/ semakin meningkat</li> <li>• Kegiatan kepemudaan, olah raga dan seni budaya semakin berkembang</li> <li>• Kesetaraan gender, partisipasi perempuan dan pengambilan kebijakan dan manajemen pembangunan serta perlindungan anak</li> <li>• Penurunan angka KDRT terus membaik di atas rata-rata propinsi Kalimantan Selatan</li> </ul>
4		Mewujudkan ketersediaan infrastruktur diberbagai bidang dan kawasan	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan rantau baru, margasari baru, binuang baru yang dapat memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW, terpeliharanya proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, rasio RTH per satuan luas wilayah yang ideal, rasio bangunan yang memiliki IMB per jumlah bangunan yang semakin kuat, luas wilayah perkotaan yang semakin proporsional, luas wilayah industri/kawasan ekonomi khusus yang semakin proporsional, luas wilayah banjir &amp; kekeringan yang semakin berkurang</li> </ul>

**Revisi RPJPD Kab. Tapin Tahun 2005 - 2025**

No.	Visi	Misi	Sasaran pokok	Indikator dan target
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kawasan rantau baru, margasari dan binuang baru</li> <li>• Semakin optimalnya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan yang ditandai Oleh tingkat pencemaran yang terjaga pada ambang toleransi dan luas lahan kritis yang semakin berkurang atau minimal tidak bertambah</li> <li>• Tertanganinya dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan baik</li> <li>• Aksesibilitas daerah meningkat signifikan melalui keterpatuhan sarana-prasarana transportasi darat yang menjangkau seluruh desa/kelurahan, dilihat dari perbaikan dalam rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik, jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum</li> <li>• Berkembangnya fasilitas wilayah dilihat dari fasilitas perekonomian dan fasilitas publik</li> <li>• Iklim berinvestasi yang kondusif bagi penanaman modal baik PMA maupun PMDN</li> </ul>
5		Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Peningkatan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis</li> <li>• Semakin efektif dan efisiennya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan menjangkau seluruh wilayah</li> <li>• Meningkatnya kinerja hasil layanan dan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha pada berbagai bidang pelayanan yang dapat dilihat dari IKM</li> <li>• Semakin meningkatnya kualitas SDM pemerintah yang sesuai tuntutan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>• Meningkatnya apaatur pemerintah daerah yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa</li> <li>• Meningkatnya penegakan dan penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat</li> </ul>